

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BENGKALIS

2016-2021



VISI : TERWUJUDNYA PERMUKIMAN YANG LAYAK BERKELANJUTAN, DAN TATA KELOLA PERTANAHAN YANG AKUNTABEL



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr Wb



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 ini telah dapat diselesaikan dengan memuat VISI dan MISI, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Bengkalis yakni dari tahun 2016 hingga 2021. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang termaktub didalam penyajian rencana program dan kegiatan Bappeda setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif berdasarkan asumsi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro daerah yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Dalam Renstra Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bengkalis ini menyajikan target capaian indikator daerah yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bengkalis pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bengkalis, Juli 2019

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS**



GENDRAYA ROHAINI, ST, M.Si
Pembina
NIP. 19780508 200604 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Landasan Hukum.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	23
2.2 Sumber Daya.....	25
2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.....	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan.....	37
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	44
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program.....	50
3.3 Telaah Renstra K/L.....	53
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	61
3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	65
3.6 Isu-Isu Strategis.....	66
BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN	70
4.1 Visi dan Misi.....	70
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	71
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	71
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	73
5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Kabupaten Bengkalis.....	73
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	74
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
BAB VIII PENUTUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alur Proses Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Priode Tahun 2016-2021.....	8
Tabel 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	15
Tabel 2.2	Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
Tabel 2.3	Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Sekretariat dan Bidang.....	26
Tabel 2.4	Komposisi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	27
Tabel 2.5	Komposisi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pada Sekretariat dan Bidang.....	28
Tabel 2.6	Komposisi ASN Berdasarkan Eselonring.....	29
Tabel 2.7	Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang.....	29
Tabel 2.8	Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang Pada Sekretariat dan Bidang.....	30
Tabel 2.9	Komposisi ASN Berdasarkan Jumlah Pada Sekretariat dan Bidang.....	31
Tabel 2.10	Prasarana dan Sarana Infrastruktur Penunjang Pada Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017.....	32
Tabel 2.11	Prasarana dan Sarana Infrastruktur Penunjang Kendaraan Kedinasan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017.....	33
Tabel 2.12	Prasarana dan Sarana Infrastruktur Penunjang Kendaraan Operasional Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017.....	33
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.....	34
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.....	36
Tabel 2.15	Indikator Kemiskinan Makro Daerah.....	37
Tabel 3.1	Daftar Rekapitulasi Rumah Layak Huni Yang telah Dibangun Periode Tahun 2011-2015.....	44
Tabel 3.2	Daftar Rekapitulasi Jumlah Keseluruhan Rumah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.....	45
Tabel 3.3	Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Bengkalis.....	46
Tabel 3.4	Cakupan Rumah Layak Huni.....	46
Tabel 3.5	Persentase Cakupan Layanan Rumah Layak Huni.....	46
Tabel 3.6	Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 341/KPTS/X/2014.....	47
Tabel 3.7	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh.....	47
Tabel 3.8	Persentase rumah tangga ber-sanitasi.....	48
Tabel 3.9	Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).....	48
Tabel 3.10	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	49
Tabel 3.11	Faktor Penghambat dan Pendorongan Pelayanan Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	52
Tabel 3.12	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L.....	57
Tabel 3.13	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	58
Tabel 3.14	Permasalahan pelayanan OPD berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.....	60
Tabel 3.15	Hasil Telaahan RTRW Kabupaten Bengkalis.....	63
Tabel 3.16	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten.....	64
Tabel 3.17	Komparasi terhadap telaah RTRW.....	64



Tabel 3.18	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS.....	65
Tabel 3.19	Identifikasi Isu-Isu Strategis.....	66
Tabel 3.20	Isu-isu Strategis yang Menjadi Prioritas.....	67
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	72
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan.....	73
Tabel 7.1	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	75



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
Grafik 2.2	Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Sekretariat dan Bidang.....	27
Grafik 2.3	Komposisi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	27
Grafik 2.4	Komposisi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pada Sekretariat dan Bidang.....	28
Grafik 2.5	Komposisi ASN Berdasarkan Eselenoring.....	29
Grafik 2.6	Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang.....	30
Grafik 2.7	Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang Pada Sekretariat dan Bidang.....	31
Grafik 2.8	Komposisi ASN Berdasarkan Jumlah Pada Sekretariat dan Bidang.....	31
Grafik 3.1	Isu-Isu yang Menjadi Prioritas.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran infrastruktur dan penataan kawasan sangat penting dalam pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan dan kesehatan. Selain itu peran infrastruktur khususnya penyediaan perumahan rakyat, serta penataan kawasan permukiman dan penataan ruang memiliki fungsi strategis didalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibidang pelayanan penyediaan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman dan pertanahan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dibidang penyediaan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan SOPD yang terbentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengurus urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), dimana urusan yang meliputi antara lain: 1.) Perumahan, 2.) Kawasan Permukiman, 3.) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, 4.) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, 5.) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta ditambah urusan Pertanahan yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis didalam upaya mensinergikan urusan berdasarkan rumpun kompetensi, kesamaan *output*, pengguna layanan, efesiensi, efektifitas yang diselaraskan dalam mendukung pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dimana berdasarkan amanat tersebut, seluruh OPD wajib menyusun Renstra sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Renstra OPD disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2016-2021.

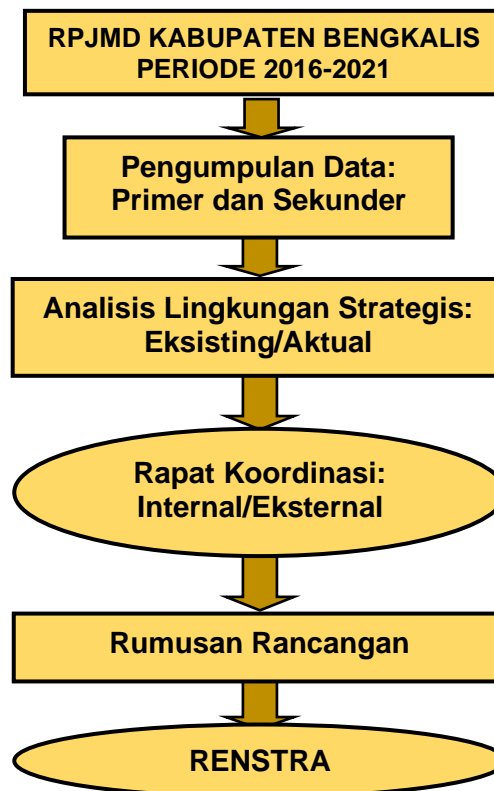
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagai institusi yang melayani pelaksanaan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat urgen dilakukan menetapkan Renstra yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis serta mengantisipasi



perkembangan masa depan. Untuk itu, Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Periode Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode.

Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan fungsi pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam pembangunan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan. Proses penyusunan Renstra tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer/sekunder (*Eksternal/Internal*), analisis kondisi aktual/eksisting, berbagai rapat/pertemuan koordinasi, perumusan rancangan Renstra dan penetapannya. Adapun proses penyusunan dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Alur Proses Penyusunan Renstra
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2016-2021



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

Untuk mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 9);



15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 Nomor 17)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 10)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.
21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai penentu arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan OPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan; dan
2. Sebagai indikator kunci keberhasilan OPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Tercapainya penyamaan persepsi didalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penyediaan pembangunan infrastruktur perumahan, penataan pemukiman dan pertanahan, sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan penyediaan infrastruktur dan penataan bagi masyarakat;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis; serta
3. Sebagai tolok ukur dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis periode Tahun 2016-2021 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,



Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

❖ BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

Menguraikan secara komprehensif mengenai gambaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terkait tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan (*threat*) dan peluang (*oppurtunity*) pelayanan yang dihadapi dimasa akan datang.

❖ BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

Memaparkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, melakukan telaah terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD Provinsi, serta penentuan isu-isu strategis.

❖ BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memaparkan penjabarkan Visi dan Misi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakan guna pencapaian Visi dan Misi tersebut dan dalam rangka untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan.

❖ BAB V. STARATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memaparkan relevansi dan konsistensi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 berkenaan dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

❖ BAB VI. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN:

Memaparkan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



❖ **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menggambarkan indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

❖ **BAB VIII. PENUTUP**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonoring, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis memiliki tugas pokok yaitu: melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok diatas, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis memiliki fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
2. Perumusan dan penetapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kepada semua instansi pemerintah dan pihak yang terkait dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas meliputi pelaporan kinerja dan keuangan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonoring, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta



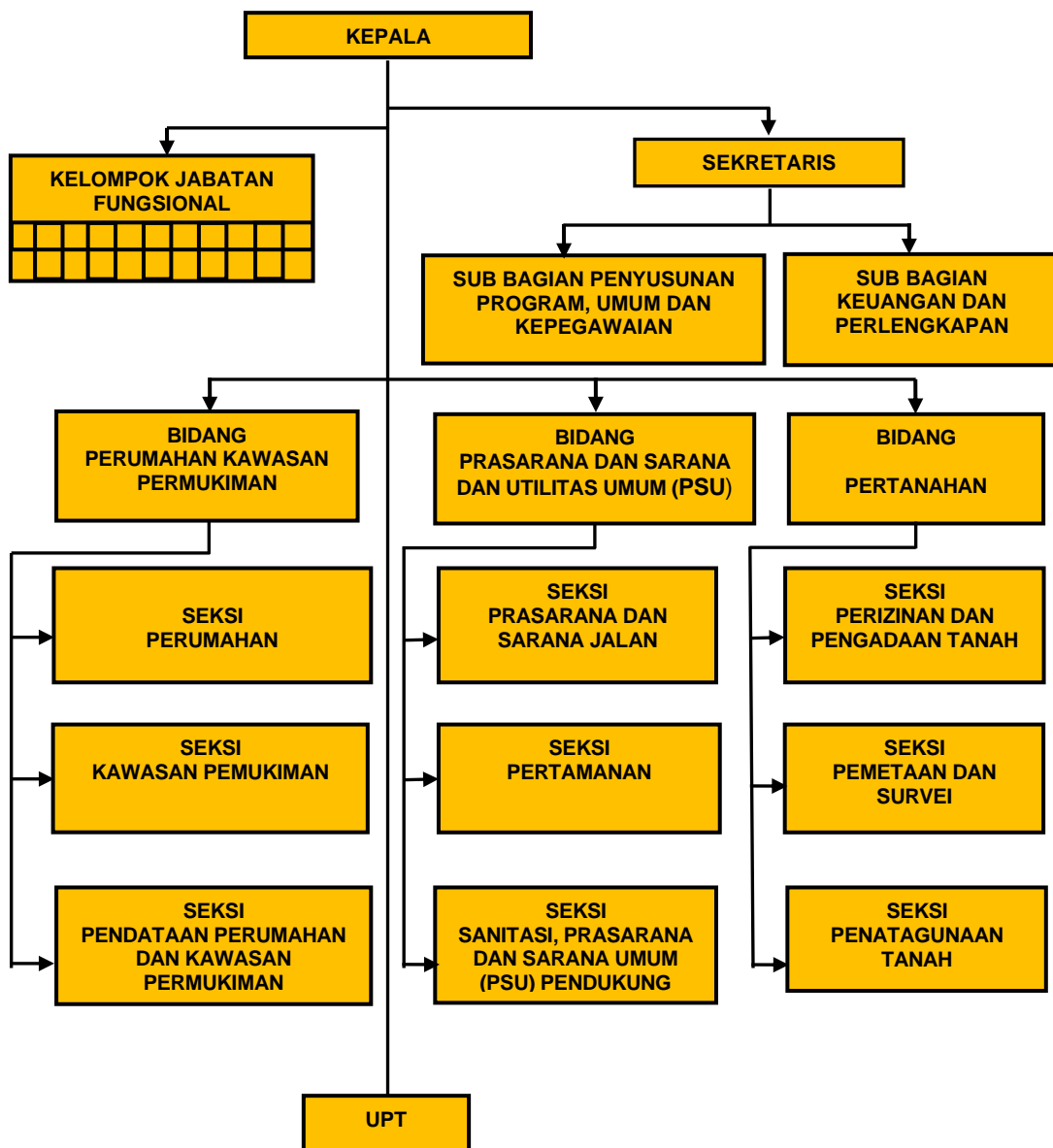
Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Seksi Perumahan;
 - b. Seksi Kawasan Permukiman; dan
 - c. Seksi Pendataan, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), terdiri dari:
 - a. Seksi Prasarana dan Sarana Jalan;
 - b. Seksi Pertamanan; dan
 - c. Seksi Sanitasi, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Pendukung.
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah;
 - b. Seksi Pemetaan dan Survei; dan
 - c. Seksi Penatagunaan Tanah.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:



Tabel 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis



Sumber: Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - b. Perumusan dan penetapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;



- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kepada semua instansi pemerintah dan pihak yang terkait dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas meliputi pelaporan kinerja dan keuangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. **Sekretaris** mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

a. **Sub Bagian Penyusunan Program**

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan pada bidang Penyusunan Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut :

- ❖ Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- ❖ Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan tata usaha;



- ❖ Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- ❖ Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- ❖ Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- ❖ Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, umum dan kepegawaian;
- ❖ Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- ❖ Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;
- ❖ Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
- ❖ Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- ❖ Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
- ❖ Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- ❖ Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut :

- ❖ Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;



- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- ❖ Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- ❖ Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- ❖ Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- ❖ Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- ❖ Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
- ❖ Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR);
- ❖ Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
- ❖ Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan asset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- ❖ Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- ❖ Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan Bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pembinaan, pendataan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan dan kawasan permukiman dengan menyelenggarakan fungsi:

- ❖ Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;



- ❖ Perumusan norma, standar, pedoman dan manual dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Pengelolaan data dan informasi dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, penataan dan pengelolaan dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan;
- ❖ Pelaksanaan pelayanan perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- ❖ Pelaksanaan pembinaan penyuluhan tentang rumah sehat
- ❖ Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Perumahan;
- b. Seksi Kawasan Permukiman; dan
- c. Seksi Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

a. Seksi Perumahan

Seksi Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Perumahan dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut :

- ❖ Menyusun rencana kerja Seksi Perumahan;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan perumahan;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perumahan;
- ❖ Memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penyelenggaraan perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- ❖ Melaksanakan fasilitasi program pembangunan rumah/perumahan;
- ❖ Melaksanakan pembinaan penyuluhan tentang rumah sehat;
- ❖ Melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- ❖ Melaksanakan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- ❖ Memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.



b. Seksi Kawasan Permukiman

Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Kawasan Permukiman dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut :

- ❖ Menyusun rencana kerja Seksi Kawasan Permukiman;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan kawasan permukiman;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan kawasan permukiman;
- ❖ Memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penyelenggaraan perizinan kawasan permukiman;
- ❖ Melaksanakan program penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- ❖ Melaksanakan program pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- ❖ Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Seksi Pendataan perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbing, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut:

- ❖ Menyusun rencana kerja seksi pendataan perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pendataan perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan pendataan perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data rumah layak huni;
- ❖ Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data serta pemetaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan;
- ❖ Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan pertimbangan teknis dalam rangka sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;



- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Melakukan koordinasi penyusunan laporan triwulan, semester dan akhir tahun dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- ❖ Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)

Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pembinaan, pendataan, pemantauan dan evaluasi dibidang PSU dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan dibidang PSU;
- b. Perumusan norma, standar, pedoman dan manual dibidang PSU;
- c. Pengelolaan data dan informasi dibidang PSU;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan dibidang PSU;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang PSU; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana dan Sarana Jalan;
- b. Seksi Pertamanan; dan
- c. Seksi Sanitasi, Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Pendukung.

a. Seksi Prasarana dan Sarana Jalan

Seksi Prasarana dan Sarana Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Prasarana dan Sarana Jalan dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut:

- ❖ Menyusun rencana kerja Seksi Prasarana dan Sarana Jalan;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana jalan;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana jalan;
- ❖ Melaksanakan perencanaan, pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan perumahan;
- ❖ Melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan pedestrian/trotoar;
- ❖ Melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU); dan



- ❖ Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Pertamanan

Seksi Pertamanan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Pertamanan dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut:

- ❖ Menyusun rencana kerja Seksi Pertamanan;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- ❖ Melaksanakan perencanaan, pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan fungsi pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- ❖ Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Sanitasi, Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Pendukung

Seksi Sanitasi, PSU Pendukung mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Sanitasi, PSU pendukung dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut:

- ❖ Menyusun rencana kerja Seksi Sanitasi, PSU Pendukung;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan yang berhubungan dengan sanitasi, PSU pendukung;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi, PSU pendukung;
- ❖ Melaksanakan perencanaan, pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan yang berhubungan dengan sanitasi, PSU pendukung;
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- ❖ Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pembinaan, pendataan, pemantauan dan evaluasi dibidang pertanahan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan dibidang pertanahan;



- b. Perumusan norma, standar, pedoman dan manual dibidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi tanah serta pengelolaan data dan informasi dibidang pertanahan;
- d. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pemetaan tematik dan survei potensi tanah;
- e. Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi tanah Pemerintah Daerah dan masyarakat berpenghasilan rendah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan perizinan dan rekomendasi dibidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan bantuan teknis perencanaan pengadaan tanah dan koordinasi dengan instansi terkait;
- i. Pelaksanaan bantuan teknis dan pemberian informasi pertanahan;
- j. Pelaksanaan penatagunaan tanah;
- k. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dibidang pertanahan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan Organisasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah;
- b. Seksi Pemetaan dan Survei; dan
- c. Seksi Penatagunaan Tanah.

a. Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah;

Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut:

- ❖ Menyusun rencana kerja Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan perizinan dan pengadaan tanah;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perizinan dan pengadaan tanah;
- ❖ Melaksanakan fasilitasi sertifikasi tanah Pemerintah Daerah dan masyarakat berpenghasilan rendah;
- ❖ Melaksanakan koordinasi dan bantuan teknis perencanaan pengadaan tanah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- ❖ Melaksanakan bantuan teknis dalam rangka tukar menukar asset Pemerintah Daerah;
- ❖ Melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;



- ❖ Melaksanakan koordinasi pelayanan izin lokasi penatagunaan tanah;
- ❖ Melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah;
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- ❖ Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Pemetaan dan Survei

Seksi Pemetaan dan Survei mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Pemetaan dan Survei dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut:

- ❖ Menyusun rencana kerja Seksi Pemetaan dan Survei;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemetaan dan survei;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemetaan dan survei;
- ❖ Melaksanakan survei, pemetaan dasar dan pemetaan tematik;
- ❖ Melaksanakan survei potensi tanah;
- ❖ Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan survei dan pemetaan; dan
- ❖ Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Penatagunaan Tanah

Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Penatagunaan Tanah dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut:

- ❖ Menyusun rencana kerja Seksi Penatagunaan Tanah;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan penatagunaan tanah;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan penatagunaan tanah;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah;
- ❖ Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat, tanah kosong dan tanah garapan;



- ❖ Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penatagunaan tanah kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- ❖ Melaksanakan penelitian dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah;
- ❖ Mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
- ❖ Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- ❖ Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis

- a. Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- b. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam daerah Kabupaten Bengkalis;
- c. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat;
- d. Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

UPT Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum di Kecamatan Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis didalam melaksanakan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai pokok dan fungsi dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yang memiliki daya



saing sesuai keahlian. Adapun SDM pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	51
2.	Perempuan	19
Jumlah		70

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017(diolah).

Berdasarkan Tabel 2.2 perbandingan ASN berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berjumlah 70 ASN yang terdiri dari 73% laki-laki dan 27% perempuan.

Grafik 2.1
Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian T.A 2017 (diolah).

Sedangkan untuk melihat komposisi ASN berdasarkan jenis kelamin pada sekretariat dan bidang-bidang pada dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Sekretariat dan Bidang

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sekretariat	13	9	21
2.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	8	3	11
3.	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	14	3	17
4.	Bidang Pertanahan	12	2	14
5.	U P T	4	2	6
Jumlah		51	19	70

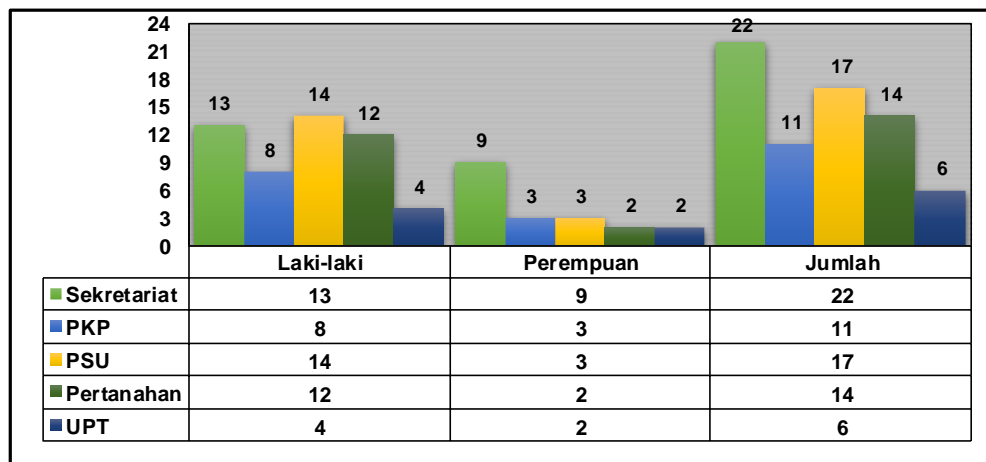
Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017(diolah).

Berdasarkan tabel 2.3 diatas ASN berjenis kelamin laki-laki yang menempati urutan terbanyak ada pada Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum dengan jumlah 14 ASN (27%), Sekretariat: 13 ASN (25%), Pertanahan: 12 ASN (24%), PKP: 8 ASN (16%) dan UPT 4 ASN (8%). Sedangkan ASN berjenis kelamin perempuan yang menempati urutan terbanyak pada Sekretariat dengan jumlah 9 ASN (47%), PKP dan PSU 3 ASN (16%) serta Pertanahan dan UPT masing-masing 2 ASN (11%).

Untuk dapat mengetahui lebih dekat komposisi ASN berdasarkan jenis kelamin pada Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada grafik 2.2 sebagai berikut:



Grafik 2.2
Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin pada Sekretariat dan Bidang



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017(diolah).

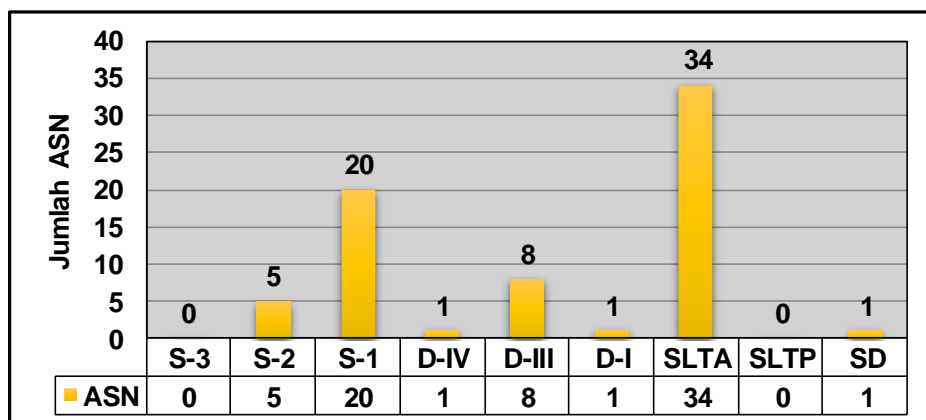
SDM sangat menentukan dalam satu unit organisasi, dimana kesiapan SDM yang berkualitas sangat menentukan dalam pencapaian program dan kegiatan. Untuk dapat melihat komposisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	Strata III/S3	-	
2.	Strata II /S2	5	
3.	Strata I /S1	20	
4.	Diploma IV	1	
5.	Diploma III	8	
6.	Diploma I	1	
7.	SLTA	34	
8.	SLTP	-	
9.	SD	1	
Jumlah		70	

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017(diolah).

Grafik 2.3
Komposisi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017(diolah).

Berdasarkan grafik 2.3 diatas, jumlah komposisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten



Bengkalis urutan terbanyak pada tamatan SLTA dengan jumlah 34 ASN (49%), S1 (29%), D-III 8 ASN (11%) dan S2 5 ASN (7%).

Tabel 2.5
Komposisi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pada Sekretariat dan Bidang

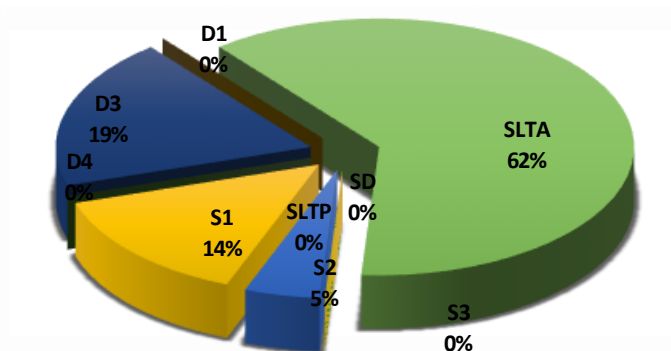
No.	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan									Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3	
1.	Kepala	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	-	-	13	-	4	-	3	1	-	21
3.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	-	-	6	-	1	-	4	-	-	11
4.	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	1	-	7	-	4	1	5	-	-	17
5.	Bidang Pertanahan	-	-	9	1	1	-	1	3	-	14
6.	U P T	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6
Jumlah		1	-	36	1	10	1	19	5	-	70

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017.

Sedangkan berdasarkan tabel 2.5 diatas, komposisi ASN berdasarkan pendidikan pada sekretariat dan bidang Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis urutan terbanyak pada Sekretariat pada pendidikan SLTA berjumlah 13 ASN, Bidang Pertanahan 9 ASN Bidang PSU dan PKP masing-masing 7 dan 6 ASN, disusul tamatan S1 di UPT berjumlah 6 ASN, Bidang PSU 5 ASN dan Bidang PKP dan Sekretariat masing-masing 4 dan 3 ASN. Tamatan D-III jumlah ASN pada Sekretariat dan Bidang PSU masing-masing 4 ASN diikuti Bidang PKP dan Pertanahan masing-masing 1 ASN.

Untuk mengetahui komposisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan ada sekretariat dan bidang pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari grafik 2.4 sebagai berikut:

Grafik 2.4
Komposisi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pada Sekretariat dan Bidang



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017(diolah).



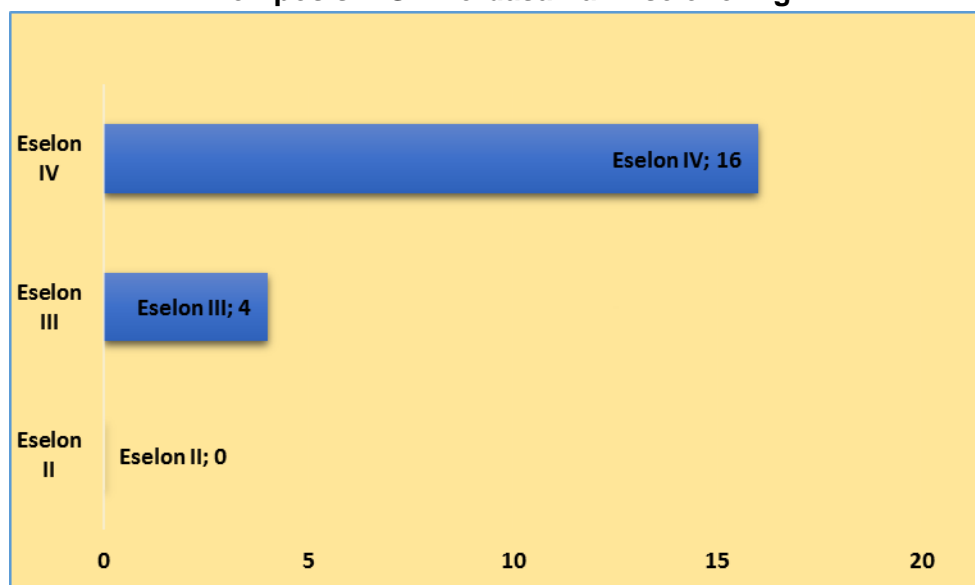
Tabel 2.6
Komposisi ASN Berdasarkan Eselenoring

No.	Unit Kerja	Jumlah	Ket
1.	Eselon II	-	
2.	Eselon III	4	
3.	Eselon IV	16	
Jumlah		20	

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017(diolah).

Berdasarkan tabel 2.6 diatas, komposisi ASN berdasarkan eselenoring pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Eselon IV menempati urutan terbanyak berjumlah 16 ASN (80%) dan Eselon III berjumlah 4 ASN (20%) dari jumlah keseluruhan Eselenoring 20 ASN.

Grafik 2.5
Komposisi ASN Berdasarkan Eselenoring



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017(diolah).

Tabel 2.7
Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang

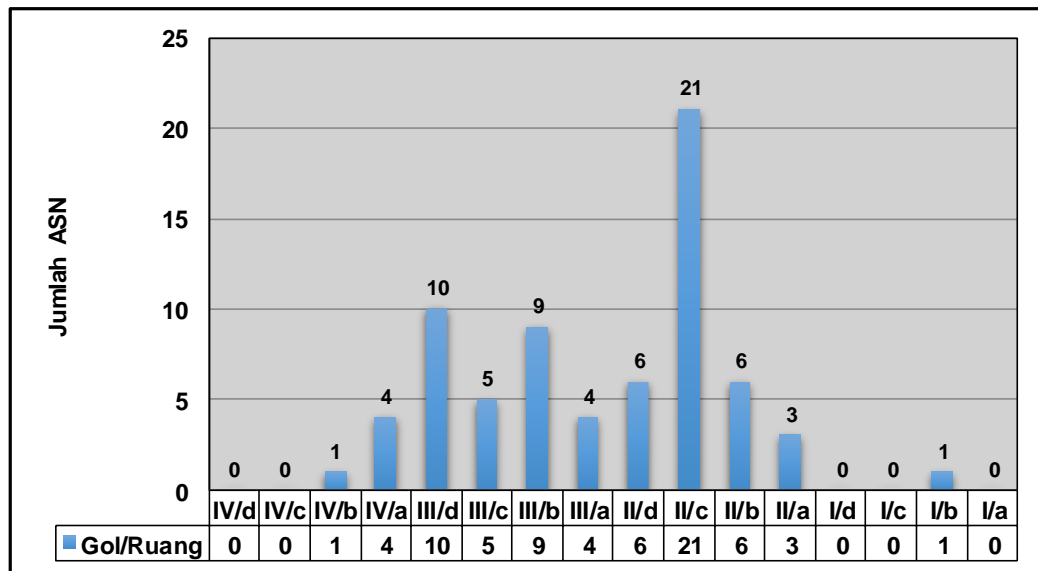
No.	Golongan	Ruang	Jumlah	Ket
1.	IV/d	Pembina Utama Madya	-	
2.	IV/c	Pembina Utama Muda	-	
3.	IV/b	Pembina Tk.I	1	
4.	IV/a	Pembina	4	
5.	III/d	Penata Tk.I	10	
6.	III/c	Penata	5	
7.	III/b	Penata Muda Tk. I	9	
8.	III/a	Penata Muda	4	
9.	II/d	Pengatur Tk. I	6	
10.	II/c	Pengatur	21	
11.	II/b	Pengatur Muda Tk. I	6	
12.	II/a	Pengatur Muda	3	
13.	I/d	Juru Tk. I	-	
14.	I/c	Juru	-	
15.	I/b	Juru Muda Tk. I	1	
16.	I/a	Juru Muda	-	
Jumlah			70	

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017(diolah).



Berdasarkan tabel 2.7 diatas, komposisi ASN berdasarkan golongan ruang pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis golongan ruang II/c Pengatur berjumlah 21 ASN (30%), III/d Penata Tk.I berjumlah 10 ASN (13%) dan III/b Penata Muda Tk. I berjumlah 10 ASN (14%).

Grafik 2.6
Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017(diolah).

Tabel 2.8
Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang Pada Sekretariat dan Bidang

No.	Unit Kerja	Golongan/Ruang				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	6	15	-	21
3.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	3	6	-	11
4.	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	-	6	10	1	17
5.	Bidang Pertanahan	3	6	5	-	14
6.	U P T	-	6	-	-	6
Jumlah		6	27	36	1	70

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017(diolah).

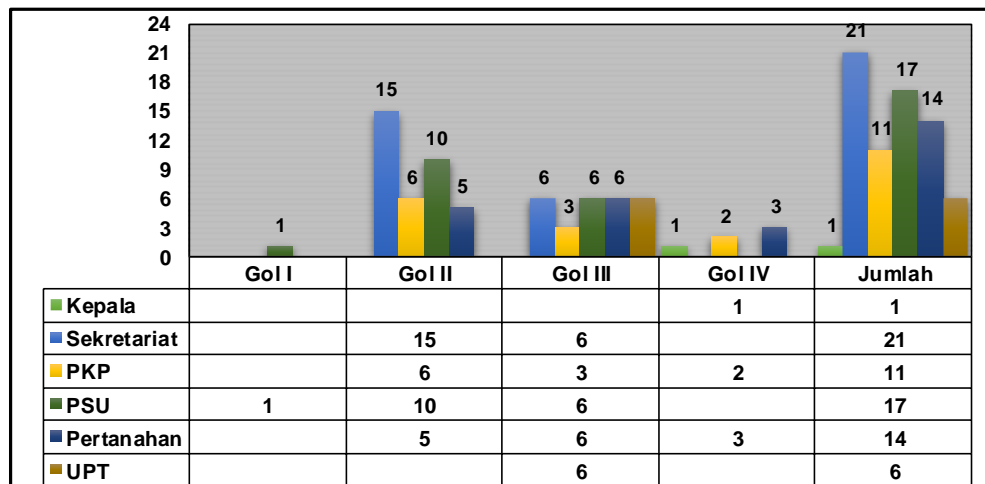
Berdasarkan tabel 2.8 diatas, komposisi ASN berdasarkan golongan ruang pada Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis golongan ruang terbanyak pada Sekretariat golongan ruang II berjumlah 15 ASN, Bidang PSU 10 ASN, Bidang PKP 6 ASN dan Petanahan 5 ASN. Sedangkan golongan ruang III berjumlah 6 ASN pada masing-masing Sekratriat Bidang PSU, Bidang Pertanahan dan UPT.

Hasil dari pemaparan diatas dapat digambarkan bahawa jumlah keseluruhan ASN berdasarkan golongan ruang pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis antara lain: golongan ruang II menempati jumlah terbesar berjumlah 36 ASN (51%), golongan ruang III: 27 ASN (39%), golongan ruang IV: 6 ASN (9%) dan golongan ruang I : 1 ASN (1%).

Komposisi ASN berdasarkan golongan ruang pada Sekretariat dan Bidang-Bidang Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada grafik 2.7 sebagai berikut:



Grafik 2.7
Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang Pada Sekretariat dan Bidang



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017(diolah).

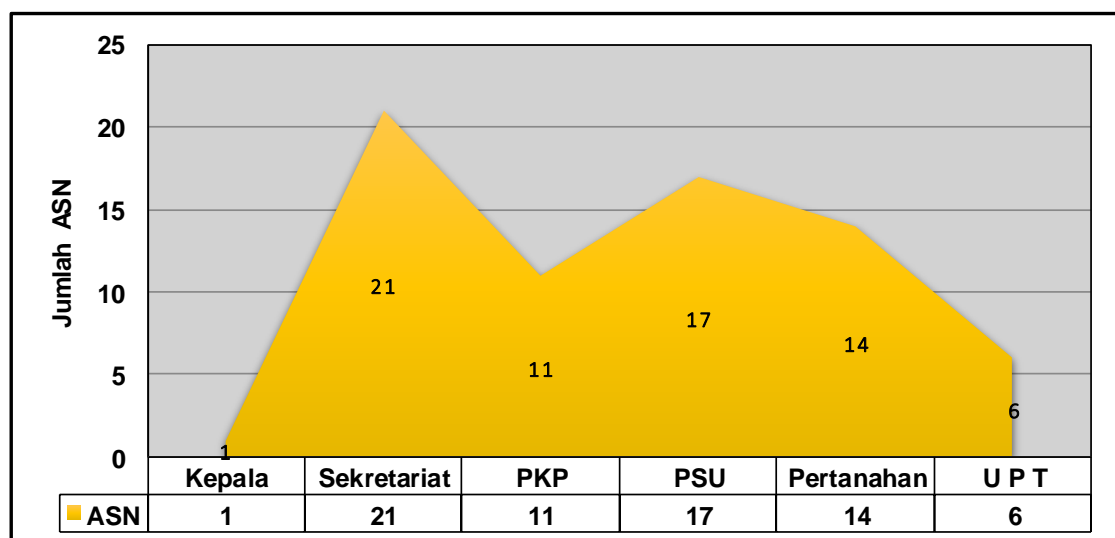
Tabel 2.9
Komposisi ASN Berdasarkan Jumlah Pada Sekretariat dan Bidang

No.	Unit Kerja	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Sekretariat	21
3.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	11
4.	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	17
5.	Bidang Pertanahan	14
6.	U P T	6
Jumlah		70

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017.

Berdasarkan tabel 2.9 diatas, komposisi ASN berdasarkan Jumlah pada Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Sekretariat menempati urutan terbanyak berjumlah: 21 ASN (30%), Bidang PSU: 17 ASN (24%) Bidang Pertanahan: 14 ASN (20%) dan UPT berjumlah: 6 ASN (9%).

Grafik 2.8
Komposisi ASN Berdasarkan Jumlah Pada Sekretariat dan Bidang



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2017(diolah).



2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis adalah aset Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bengkalis yang dilimpahkan kepada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Sarana dan prasarana yang menjadi asset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan antara lain bangunan gedung kantor, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan, peralatan kantor dan perlengkapan kantor.

Untuk pelaksanaan tugas dinas di Kecamatan, akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas UPT yang ada berupa bangunan gedung kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Khusus untuk bangunan gedung kantor, UPT yang telah memiliki gedung kantor adalah UPT di Kecamatan Rupert dan Kecamatan Mandau, yang merupakan pelimpahan aset dari Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. Sedangkan bangunan gedung kantor UPT Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Pinggir masih menumpang dengan kantor UPT lain di Kantor Camat.

Sarana dan prasarana kantor yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disajikan dalam tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Prasarana dan Sarana Infrastruktur Penunjang
Pada Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017

No.	Jenis Aset	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi Asset	Ket
1.	Peralatan dan Mesin	Laptop	26	Baik dan Rusak	
		Komputer PC	23	Baik dan Rusak	
		Mini Komputer	6	Baik dan Rusak	
		Notebook	1	Baik	
		Printer	42	Baik dan Rusak	
		Pick up	9	Baik dan Rusak	2 Rusak Berat
		Mobil Tangki	1	Baik	
		Mobil Hidrolik Listrik	1	Baik	
		Station Wagon	5	Baik	
		Sepeda Motor	22	Baik	
		Kendaraan roda tiga	7	Baik	
		GPS	4	Baik	
		Teodolite	1	Baik	
		Mesin Bor	1	Baik	
2.	Gedung dan Bangunan	Bangunan gedung kantor permanen	4	Baik	
		Bangunan gedung tempat ibadah	1	Baik	
		Gedung pos jaga permanen	1	Baik	

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan T.A 2017 (diolah).



Tabel 2.11

**Prasarana dan Sarana Infrastruktur Penunjang
Kendaraan Kedinasan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017**

No	Seri Kendaraan	Jenis Bahan Bakar	Tipe	Fungsi	Ket
1.	Chevrolet Captiva	Solar	SUV*	Operasional Kadis	
2.	Nissan Grand Livina 1.6	Premium	MPV**	Operasional Sekretaris	
3.	Nissan Navara	Solar	Double Cabin	Operasional Lapangan	
4.	Mitsubishi Strada Triton	Solar	Double Cabin	Operasional Lapangan	
5.	Toyota Rush 1.5 VVTI	Premium	MPV	Operasional Kabid	
6.	Toyota Rush 1.5 VVTI	Premium	MPV	Operasional Kabid	
7.	Toyota Rush 1.5 VVTI	Premium	MPV	Operasional Kabid	

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan T.A 2017 (diolah).

*) Sport Utilities Vehicles

**) Multi Purpose Vehicle

Tabel 2.12

**Prasarana dan Sarana Infrastruktur Penunjang
Kendaraan Operasional Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017**

No	Seri Kendaraan	Jenis Bahan Bakar	Tipe	Fungsi	Lokasi	Ket
1.	Isuzu NMR71 HD 125 PS	Solar	Tower Crane Hydraulic	Multi Fungsi	Bengkalis	
2.	Isuzu Elf HD 125 PS	Solar	Mobil Tanki 5000 L	Penyiram	Bengkalis	
3.	Toyota Hilux S-Cab	Solar	Single Cabin Pickup	Multi Fungsi	Bengkalis	
4.	Toyota Hilux S-Cab	Premium	Single Cabin Pickup	Multi Fungsi	Bengkalis	
5.	Toyota Hilux S-Cab	Solar	Single Cabin Pickup	Multi Fungsi	Mandau	
6.	Mitsubishi CD100 PS	Solar	Mobil Tanki	Penyiram	Mandau	
7.	Mitsubishi CD 100 PS	Solar	Mobil Pickup Besar	Multi Fungsi	Mandau	
8.	Kaisar Triseda RX 150	Premium	Motor Roda 3 Pickup	Multi Fungsi	Bengkalis	
9.	Kaisar Triseda RX 150	Premium	Motor Roda 3 Pickup	Multi Fungsi	Bantan	
10.	Kaisar Triseda RX 150	Premium	Motor Roda 3 Pickup	Multi Fungsi	Bukit Batu	
11.	Kaisar Triseda RX 150	Premium	Motor Roda 3 Pickup	Multi Fungsi	Siak Kecil	
12.	Kaisar Triseda RX 150	Premium	Motor Roda 3 Pickup	Multi Fungsi	Mandau	
13.	Kaisar Triseda RX 150	Premium	Motor Roda 3 Pickup	Multi Fungsi	Pinggir	
14.	Kaisar Triseda RX 150	Premium	Motor Roda 3 Pickup	Multi Fungsi	Rupat	
15.	Isuzu Elf 125 PS	Solar	Tower Crane Hydraulic	PJU/Listrik	Bengkalis	
16.	Isuzu Elf 75 PS	Solar	Tower Crane Hydraulic	PJU/Listrik	Bengkalis	
17.	Mitsubishi HD 125	Solar	Tower Crane Hydraulic	PJU/Listrik	Mandau	

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan T.A 2017 (diolah).

2.4 Kinerja Pelayanan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pertanahan. Indikator kinerja urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebanyak 3 indikator dan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 sebanyak 3 indikator.



Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD *)	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	ASPEK PELAYANAN UMUM																			
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB																			
A.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
	1. Rumah tangga ber-sanitasi	%	-		-	11.20	11.58	11.77	11.97	12.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Lingkungan permukiman kumuh	%	-	0.00	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Cakupan rumah layak huni	%	100	100	-	96.21	96.59	96.96	97.32	97.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	%	70	60	-	40.62	45.80	50.88	56.09	61.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100	30	-	12	15	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.	PERTANAHAN																			
	a) Persentase luas lahan bersertifikat	%	-	20	-	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) Penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	%	-	30	-	5	10	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) Penyelesaian izin lokasi	%	-	23	-	15	17	19	21	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian T.A 2017 (diolah).



Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis belum dapat diukur disebabkan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada saat penyusunan Renstra baru memasuki tahun pertama. Namun indikator urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman sebelumnya menjadi indikator Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bengkalis, sedangkan indikator urusan wajib pertanahan sebelumnya menjadi indikator Bagian Pertanahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.



Tabel 2.14

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

Program	Anggaran Pada Tahun ke- (Juta Rupiah)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Juta Rupiah)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (Juta Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.170,93	4.015,00	4.145,00	4.380,00	4.405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,56	0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.957,90	3.340,00	4.190,00	3.410,00	3.675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,05	0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	95,75	100,00	120,00	270,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,04	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	200,00	200,00	250,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,67	0,00
Program Pengembangan Perumahan	1.533,82	13.450,00	27.150,00	27.625,00	28.175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,02	0,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan	0,00	128.545,00	170.445,00	139.900,00	142.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,47	0,00
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	20.148,80	9.600,00	9.050,00	12.100,00	12.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,96	0,00
Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	205.681,31	88.000,00	88.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,60	0,00
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1.164,26	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,73	0,00
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	349,96	350,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,39	0,00
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,47	0,00
Jumlah	234.302,73	249.200,00	305.450,00	310.185,00	313.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 (diolah).



Sebagaimana telah dijelaskan secara komprehensif sebelumnya, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis baru dibentuk dan mulai melakukan pelayanan pada tahun 2017, sehingga data pendanaan yang disajikan hanya anggaran 5 (lima) tahun kedepan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menuntut peningkatan peran dan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

Secara garis besar permasalahan yang menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terdiri atas 3 (isu) yaitu: Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, isu Pekerjaan Umum adalah: penyediaan sanitasi, penanganan pemukiman kumuh sedangkan isu penataan ruang terdiri dari: Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan isu perumahan yang terdiri dari: Ketersediaan Rumah Layak Huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun tantangan dan peluang yang mempengaruhi peran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis baik secara internal maupun eksternal sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

a. Jumlah Penduduk miskin yang semakin meningkat

Tingginya angka kemiskinan berkorelasi dengan penyediaan infrastruktur, penanganan pemukiman kumuh dan penyediaan sanitasi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mengetahui lebih dekat kondisi angka kemiskinan makro di Kabupaten Bengkalis dalam rentang waktu enam tahun (2009-2014) dapat dilihat pada tabel 2.15 bawah ini:

Tabel 2.15
Indikator Kemiskinan Makro Daerah

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Garis Kemiskinan (000) (Rp.)	295,96	325,48	349,77	375,87	388,67	409,95
Jumlah Penduduk Miskin (000) jiwa	63,4	41,1	35	35,7	40,10	38,82
Tingkat Kemiskinan Po (%)	7,91	8,25	6,72	6,76	7,57	7,20
Tingkat Kedalaman Kemiskinan P1 (%)	1,19	1,70	0,7	0,97	0,84	-
Tingkat Keparahan Kemiskinan P2 (%)	0,35	0,52	0,14	0,24	0,15	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015.

Berdasarkan kepada tabel 2.15 diatas, garis kemiskinan sebagai akibat perkembangan inflasi dan PDRB per kapita mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp. 6,76,-/tahun. Trend peningkatan garis kemiskinan menyebabkan bertambah pula jumlah penduduk di Kabupaten



Bengkalis yang berkategori miskin, sehingga secara makro tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan pula.

Sedangkan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan yang mengindikasikan kondisi kemelaratan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bengkalis justru menunjukkan trend penurunan yang sebelumnya tingkat kedalaman kemiskinan tahun 2009 sebesar 1,19 % menurun menjadi 0,84 % di tahun 2014 dan tingkat keparahan tahun 2009 sebesar 0,35 % menurun menjadi 0,15% di tahun 2014. Perkembangan kedua indikator ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan sosial dikelompok masyarakat miskin oleh kebijakan dan program baik yang dilaksanakan secara nasional di Kabupaten Bengkalis dan juga oleh program daerah penanggulangan kemiskinan.

b. Penurunan pendapatan daerah

Pembiayaan pembangunan Kabupaten Bengkalis berupa transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) khususnya dari penerimaan Minyak Bumi. Namun berdasarkan kondisi *lifting* minyak bumi di Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung menurun sehingga berpengaruh pada sumber pembiayaan Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang.

Sementara itu sumber pembiayaan lain dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah maupun yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai sumber pembiayaan pembangunan masih belum maksimal. Untuk itu, selain upaya peningkatan PAD perlu juga dilakukan upaya mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi sebagai menutupi defisit pembiayaan daerah dimasa depan.

Berdasarkan data dari Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2016, realisasi pendapatan daerah hingga Bulan Desember 2015 sebesar 2,68 trilyun, sedangkan pada tahun 2014 realisasi pendapatan daerah sebesar 3,99 trilyun, terjadi penurunan sebesar 32,64%.

c. Bencana alam dan penurunan lingkungan hidup

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan termasuk kawasan perairan disekitarnya adalah 7.773,93 Km² atau setara dengan 777.393 Ha atau sekitar 9,46% dari wilayah Provinsi Riau yang memiliki luasan 107.932,71 Km² atau setara dengan 10.793.271 Ha.

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis umumnya relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2-6 mdpl. Bentuk wilayah daratannya sebagian besar berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0-3 mdpl yang mencakupi 71 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 551.949 ha, kecuali pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdpl yang mencakupi 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 ha. Selanjutnya kemiringan antara 8-16 dpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2 % dari luas



wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 ha dan terakhir kemiringan >16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakupi 8 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.91 ha.

Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang, dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem mangrove/tumbuhan pantai dan karakteristik daratan pantai umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan oleh energi gelombang laut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat di lokasi tersebut.

Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi di Kabupaten Bengkalis berada pada pesisir bagian utara Pulau Rupat yang berhadapan dengan Selat Malaka, Kecamatan Bukit Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati dan bagian utara Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Malaka.

Perkembangan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan menggunakan kayu mangrove untuk berbagai keperluan dalam pembangunan juga adanya perluasan areal perumahan selama beberapa tahun terakhir mengakibatkan berkurangnya hutang mangrove yang menyebabkan peningkatan abrasi kawasan pesisir. Hal ini akan menjadi persoalan yang sangat besar yang dapat mengancam perumahan dan permukiman di kawasan pesisir. Selain ancaman tingginya abrasi juga adanya ancaman angin puting beliung dan gelombang tinggi bahkan banjir rob jika kawasan pesisir tidak di tata kelola dengan baik.

Disamping tata kelola kawasan pesisir, tata kelola drainase yang belum optimal dan berkurangnya daerah tangkapan air hujan akan menyebabkan kawasan permukiman tertentu baik di daerah pulau maupun kawasan perkotaan akan terdampak banjir jika musim penghujan dengan intensitas hujan yang tinggi terjadi.

Metoda yang digunakan dalam menyusun strategi guna mewujudkan sasaran dan indikator adalah metoda analisa SWOT yang merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. Adapun singkatan dari SWOT itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Strength* (S) : merupakan **KEKUATAN** optimal untuk mewujudkan target sasaran.
- *Weakness* (W) : merupakan Faktor **KELEMAHAN** yang ada, dan harus dihilangkan untuk mengoptimalkan pencapaian target sasaran.
- *Opportunities* (O) : merupakan **PELUANG** yang tersedia dan dapat digunakan untuk mengoptimalkan pencapaian target sasaran.
- *Threats* (T): merupakan **ANCAMAN** yang menghadang kita dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target sasaran



Secara sistematis analisis tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan factor-faktor dalam organisasi (S dan W).

Analisis SWOT dapat digunakan dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal yaitu kekuatan dan kelemahan, sedangkan unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman. Di bawah ini dapat dijelaskan mengenai Analisis faktor internal dan eksternal yang terjadi pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Analisis Faktor Internal merupakan suatu Rencana pencapaian penyediaan sasaran Insfrastruktur Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (*Strenghts*) dan kelemahan-kelemahan (*Weaknesses*). Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut;

a. Kekuatan (*Strenght*)

- Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggara pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
- Adanya struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan yang merupakan perpanjangan wewenang dari kantor pusat;
- Menciptakan sumberdaya manusia yang handal untuk melaksanakan pembangunan dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknis dan membangun database pembangunan infrastruktur daerah;

b. Kelemahan (*Weakness*)

- Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan peraturan tersebut, untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Sampai dengan dibentuknya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, Perda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai saat ini belum disusun. Selain Perda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, peraturan yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah pemanfaatan ruang. Sebagaimana diketahui sampai saat ini revisi Perda Nomor Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis belum disahkan dan diundangkan. Sedangkan



kesesuaian lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus mengacu dan sesuai dengan RTRW.

- Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Basis data sangat diperlukan dalam perencanaan kegiatan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan/peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum serta bidang pertanahan. Seperti halnya data rumah tidak layak huni di Kabupaten Bengkalis, pendataan dilakukan dengan cara meminta kepada Desa/Kelurahan untuk menyampaikan data warganya yang belum memiliki rumah layak huni. Namun data yang disampaikan belum optimal, sehingga pendataan perlu dilakukan secara terus menerus untuk memperbarui data yang sudah ada tersebut. Begitu pula halnya dengan cakupan lingkungan yang aman dan sehat yang telah didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum belum terdata dengan baik.

Pada bidang pertanahan juga terkendala dengan data tanah-tanah pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat. Khususnya tanah yang dihibahkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah, sehingga kesulitan dalam fasilitasi sertifikasi tanah dimaksud.

- Belum optimalnya peran dan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan bidangnya.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis baru dibentuk pada tahun 2016, dan pejabat tinggi pratama, administrasi, pengawas dan fungsional baru dilantik dan ditetapkan pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 serta mengalami beberapa fase perubahan rotasi/promosi dan mutasi ASN. Meskipun pada umumnya ASN yang ditempatkan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan ASN yang pernah bertugas di Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman dan Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang juga menyelenggarakan urusan wajib perumahan, namun belum semua ASN memahami peraturan tentang perumahan dan kawasan permukiman.

- Belum optimalnya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan di kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan.

Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan pada kawasan permukiman belum tertata secara optimal sesuai dengan kekhasan wilayahnya masing-masing baik terkendala anggaran, arah penataan maupun perilaku masyarakat setempat. Berkembangnya lingkungan permukiman kumuh dikawasan perkotaan ibu kota kecamatan akan berdampak pada cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Berkembangnya lingkungan permukiman kumuh juga terjadi di pedesaan pada umumnya dikawasan permukiman nelayan.



2. Analisis Faktor Eksternal

Analisis Faktor Eksternal terkait penanganan Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam mengidentifikasi peluang-peluang (*Opportunity*) dan ancaman-ancaman (*threats*) yang berhubungan dengan rencana pencapaian sasaran dimanfaatkan dari kondisi makro sebagai berikut:

a. Peluang (*strenght*)

- Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung pembangunan infrastruktur penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
- Dukungan pendanaan dan Kepala Daerah serta *stockholder* dalam penyediaan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis.
- Landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan di daerah yang ditangani oleh lembaga pemerintah setingkat eselon II berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
- Program Satu Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahun dari Pemerintah Pusat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah dalam pembangunan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah layak huni.
- Adanya program dan kegiatan yang mendukung peningkatan SDM di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan.
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja gedung kantor, peralatan dan perlengkapan, dan kendaraan operasional penunjang.
- Perkembangan arus teknologi informasi dan telekomunikasi sangat pesat dewasa ini sangat menunjang dalam koordinasi, konsultasi dan pelaksanaan tugas dengan pihak-pihak terkait.
- Target pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan dasar dibidang perumahan dan kawasan permukiman kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Kekompakkan, integritas dan rasa tanggung jawab pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas menjadi kekuatan yang sangat besar.

b. Ancaman (*threats*)

- Semakin tingginya masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian yang layak;
- Masih tingginya urbanisasi sehingga semakin bertambahnya kawasan permukiman kumuh perkotaan;
- Terbatasnya kawasan publik dan ruang terbuka hijau;
- Minimnya akses prasarana dan sarana utilitas umum;



- Kurangnya keseimbangan antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan disetiap bidang kerja yang ada di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Berikut identifikasi permasalahan disetiap bidang kerja antara lain:

3.1.1 Permasalahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Identifikasi isu strategis dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berangkat dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu: penyediaan perumahan dan pengentasan kawasan permukiman kumuh. Isu ini sejalan dengan isu-isu strategis secara nasional maupun regional.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah memprogramkan penyediaan 1 (satu) juta rumah setiap tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut dimaksud untuk memenuhi ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat dijangkau oleh masyarakat, mengingat masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang ada angka *backlog* nasional sebesar 7,5 juta dan rumah tidak layak huni secara nasional sebanyak 3,4 juta unit. Sedangkan untuk pengentasan kawasan permukiman kumuh Pemerintah mengagendakan penurunan kawasan kumuh dikawasan permukiman perkotaan menjadi 0%. Berdasarkan hasil identifikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2014, luas kawasan kumuh mencapai 38.431 Ha di 4.108 kawasan dan luas kawasan kumuh di Provinsi Riau mencapai 823,40 Ha.

Sejalan dengan agenda pemerintah, Kabupaten Bengkalis telah memprogramkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu pada RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010-2015. Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu yang telah dibangun selama periode tersebut sebanyak 3000 unit tersebar di 8 (delapan) kecamatan. Untuk mengetahui realisasi jumlah rumah layak huni yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan penyebaran per Kecamatan dan anggaran yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1
Daftar Rekapitulasi Rumah Layak Huni yang Telah Dibangun
Periode Tahun 2011-2015

No.	Kecamatan	Tahun/Unit					Jumlah (Unit)	Anggaran Terealisasi (Rp.)
		2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Mandau	100	90	100	100	96	486	27.220.000.000
2.	Pinggir	100	78	100	90	90	458	25.600.000.000
3.	Bukit Batu	65	90	70	70	70	365	20.375.000.000
4.	Siak Kecil	65	72	75	70	70	352	19.750.000.000
5.	Rupat	65	66	72	65	64	332	18.565.000.000
6.	Rupat Utara	65	30	50	40	40	225	12.375.000.000
7.	Bantan	70	54	63	70	70	327	18.415.000.000
8.	Bengkalis	70	120	70	95	100	455	25.700.000.000
	Jumlah	600	600	600	600	600	3000	168.000.000.000

Sumber Data : Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 (diolah).

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, Kecamatan Mandau mendapatkan alokasi RLH terbesar Periode Tahun 2011 s.d 2015 dimana sebesar: 16,20% dari jumlah keseluruhan anggaran yang tersedia, diikuti oleh Kecamatan Bengkalis: 15,30%, Pinggir: 15,24%, Bukit Batu: 12,13%, Siak Kecil: 11,76%, Rupat: 11,05%, Bantan: 10,96% dan Rupat Utara: 7,37%.

Sedangkan alokasi RLH yang bersumberkan dari anggaran Provinsi Riau berjumlah 116 RLH yang telah dibangun, sehingga jumlah RLH yang telah dibangun yang bersumberkan dari Anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Provinsi berjumlah 3116 unit RLH.

Tabel 3.2
Daftar Rekapitulasi Jumlah Keseluruhan Rumah di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Usulan Penerima RLH	Kondisi Rumah (Unit)			Ket
			Tidak Punya	Rusak Berat	Rusak Ringan	
1.	Bantan	647	129	212	218	
2.	Bangkalis	1074	313	365	376	
3.	Bukit Batu	73	20	39	5	
4.	Mandau	570	73	319	178	
5.	Pinggir	1037	282	173	341	
6.	Siak Kecil	728	192	284	252	
7.	Rupat	318	39	172	87	
8.	Rupat Utara	549	150	190	208	
	Jumlah	4996	1198	1754	1665	

Sumber Data : Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 (diolah).

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, jumlah rumah tangga kurang mampu yang belum memiliki atau memiliki rumah namun tidak layak huni di Kabupaten Bengkalis berdasarkan data Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis tahun 2016 berjumlah: 4996 rumah tangga, dimana sebanyak 1198 rumah tangga belum memiliki rumah, sebanyak 1754 rumah tangga memiliki rumah dengan kondisi rusak berat, dan sebanyak 1665 rumah tangga memiliki rumah dengan kondisi rusak ringan.

Sedangkan untuk mengetahui gambaran umum kondisi rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Persentase rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis sampai dengan akhir tahun 2016 baru tercapai sebesar 90,54%. Jumlah rumah tangga yang



belum menempati rumah layak huni berdasarkan data dari Kecamatan se Kabupaten Bengkalis sampai akhir tahun 2016 sebanyak 4996 keluarga. Dengan demikian masih terdapat rumah tangga kurang mampu yang belum menempati rumah yang layak huni hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Bengkalis

No.	Uraian	Tahun 2016	Ket
1.	Jumlah Rumah Layak Huni	142.373	
2.	Jumlah Seluruh Rumah	164.134	
3.	Persentase Rumah Layak Huni	90,54%	

Sumber Data : Laporan Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 (diolah).

2. Cakupan rumah layak huni sampai akhir tahun 2016 persentase sebesar 90,54%, dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Cakupan Rumah Layak Huni

No.	Uraian	Tahun 2016	Ket
1.	Jumlah Rumah Layak Huni disuatu wilayah kerja pada waktu kurun tertentu	142.373	
2.	Jumlah Rumah disuatu wilayah kerja pada waktu kurun tertentu	164.134	
3.	Persentase cakupan Rumah Layak Huni	90,54%	

Sumber Data : Laporan Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 (diolah).

3. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sampai akhir tahun 2016 sebesar 38,41%, dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Persentase Cakupan Layanan Rumah Layak Huni

No.	Uraian	Tahun 2016	Ket
1.	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau pada kurun waktu tertentu	3.116	
2.	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	8.112	
3.	Persentase cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	38,41	

Sumber Data : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman T.A 2017 (diolah).

Sedangkan berdasarkan hasil identifikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) pada tahun 2014, luas kawasan kumuh di Kabupaten Bengkalis berjumlah ±180,33 Ha yang dibagi dalam 12 kawasan (kelurahan/desa). Hasil identifikasi tersebut ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 341/KPTS/X/2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Bengkalis. Sebaran dan profil dari masing-masing kawasan dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:



Tabel 3.6
Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 341/KPTS/X/2014

No.	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Kekumuhan
1.	Bengkalis	Damon	Kawasan Perkotaan Bengkalis-Parit Bangkong	6,95	Kumuh Berat
2.	Bengkalis	Kelapapati	Kawasan Perkotaan Bengkalis-Kelapapati	9,52	Kumuh Sedang
3.	Bengkalis	Rimba Sekampung	Kawasan Perkotaan Bengkalis-Cik Mas Ayu	11,23	Kumuh Sedang
4.	Mandau	Duri Barat	Kawasan Perkotaan Duri-Duri Barat	7,11	Kumuh Ringan
5.	Mandau	Batang Serosa	Kawasan Perkotaan Duri-Batang Serosa	13,11	Kumuh Sedang
6.	Mandau	Balik Alam	Kawasan Perkotaan Duri-Balik Alam	17,11	Kumuh Sedang
7.	Pinggir	Pinggir	Pinggir	4,22	Kumuh Sedang
8.	Bantan	Selat Baru	Pantai Indah Selat Baru	17,79	Kumuh Ringan
9.	Bukit Batu	Sungai Pakning	Sekitar Pasar Sungai Pakning	27,00	Kumuh Ringan
10.	Siak Kecil	Lubuk Muda	Pasar Baru Lubuk Muda	29,68	Kumuh Ringan
11.	Rupat	Batu Panjang	Batu Panjang	24,71	Kumuh Sedang
12.	Rupat Utara	Tanjung Medang	Pemukiman Nelayan Tanjung Medang	11,81	Kumuh Ringan
Jumlah				180,33	

Sumber Data : Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 (diolah).

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, persentase kawasan kumuh di Kabupaten Bengkalis sangatlah kecil yaitu sebesar 0,0231%, dimana luas kawasan permukiman kumuh berjumlah 180,33 Ha (1,8033 Km²), sedangkan dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Bengkalis seluas 7.793,93 Km².

Tabel 3.7
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

No.	Uraian	Tahun 2016	Ket
1.	Luas lingkungan pemukiman kumuh	1,8033	
2.	Luas wilayah	7.793,93	
3.	Persentase luas lingkungan pemukiman kumuh	0,0231	

Sumber Data : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman T.A 2017 (diolah).

3.1.2 Permasalahan Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)

Isu strategis bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) bberangkat dari belum seluruh masyarakat dapat mengakses prasarana dan sarana utilitas umum di kawasan perumahan. Artinya belum semua lingkungan perumahan didukung PSU yang meliputi jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) hanya menangani PSU jalan, drainase, sanitasi, listik penerangan jalan umum, taman, dan PSU pendukung lainnya. Disamping itu untuk PSU jalan dan drainase lingkungan perumahan di desa-desa juga ditangani oleh Pemerintah Desa melalui dana desa. Sedangkan untuk PSU persampahan ditangani oleh OPD yang memiliki kewenangan dibidang persampahan.

PSU jalan dan drainase lingkungan perumahan yang telah terbangun selama ini belum terdata seluruhnya. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan



drainase lingkungan perumahan sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis. Pembangunan dan peningkatan jalan dan drainase lingkungan yang telah dilaksanakan belum terarah pada peningkatan kualitas lingkungan perumahan. Sehingga dalam suatu lingkungan perumahan masih ada PSU jalan dan drainase lingkungan yang belum ada atau perlu ditingkatkan dan/atau dipelihara.

Pada umumnya lingkungan perumahan yang didukung PSU sanitasi, air bersih, listrik penerangan jalan umum dan persampahan adalah lingkungan perumahan di perkotaan. Untuk PSU listrik penerangan jalan umum pembangunan baru bisa dilaksanakan di lingkungan perumahan perkotaan disebabkan jumlah penduduk yang lebih tinggi dari perdesaan juga untuk menata daerah perkotaan sebagai pintu gerbang wilayah. Disamping itu, biaya beban listrik yang dibayar Pemerintah Daerah untuk listrik penerangan jalan umum cukup besar yaitu sekitar 20 milyar per tahun. Pelanggan air bersih PDAM pada tahun 2015 14.246 konsumen atau 11,21% dari jumlah rumah tangga se-Kabupaten Bengkalis (sumber:bengkaliskab.bps.go.id). Sedangkan PSU sanitasi baru pembuatan *septic tank*/tangi penampungan limbah pada masing-masing rumah tangga, namun pada umumnya tidak dilengkapi dengan sumur resapan (*reservoir*). PSU sanitasi berupa sistem pembuangan sanitasi lingkungan atau sistem pembuangan sanitasi kota dengan cara pengolahan lain belum terbangun.

Untuk mengetahui gambaran umum cakupan layanan PSU dan rumah tangga ber-sanitasi dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Persentase rumah tangga ber-sanitasi

No.	Uraian	Tahun 2016
1.	Jumlah rumah tangga ber-sanitasi	9.026,87
2.	Jumlah seluruh rumah tangga	127.139
3.	Persentase rumah tangga ber-sanitasi	7,1%

Sumber : Laporan Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 (diolah).

Tabel 3.9
Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

No.	Uraian	Tahun 2016
1.	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	45
2.	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	150
3.	Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	30,00

Sumber : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (diolah)

3.1.3 Permasalahan Bidang Pertanahan

Gambaran umum kondisi pertanahan dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

1. Persentase luas lahan bersertifikat sampai dengan akhir tahun 2016 baru mencapai 20%;
2. Penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 7 kasus; serta
3. Penyelesaian izin lokasi sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 65 lokasi.



Tabel 3.10
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Gambaran pelayanan OPD dan Laporan Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2016	➢ Persentase rumah tangga ber-sanitasi 7,1%	Permendagri No. 54/2010	Kapasitas untuk melakukan pendataan rumah tangga ber-sanitasi	Kesadaran masyarakat tentang sanitasi masih kurang	➢ Sanitasi yang diselenggarakan terbatas sanitasi lingkungan perumahan ➢ Data rumah tangga ber-sanitasi tidak lengkap dan tidak terbaru
	➢ Persentase lingkungan permukiman kumuh 0,0231%	Permendagri No. 54/2010 Target nasional kawasan kumuh 0% pada tahun 2019	SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis	➢ Kesadaran masyarakat rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi cukup tinggi ➢ Hasil identifikasi terbaru luas kawasan kumuh berdasarkan dokumen RPKP2KPKP	➢ Perubahan luas kawasan kumuh berdasarkan hasil identifikasi kegiatan RPKP2KK.
	➢ Persentase rumah layak huni mencapai 60,35% ➢ Persentase cakupan rumah layak huni	Permendagri No. 54/2010 Permenpera No. 22/2008 tentang SPM Perumahan Target nasional penyediaan rumah layak huni 100% tahun 2025	➢ Kapasitas untuk melakukan pendataan rumah tidak layak huni ➢ Kapasitas untuk melakukan pemberian rekomendasi teknis di bidang perizinan perumahan dan kawasan permukiman	➢ Tingkat pertumbuhan penduduk baik dari kelahiran maupun dari urbanisasi khususnya di kawasan perkotaan cukup tinggi ➢ Masyarakat kurang mampu belum memiliki bukti hak atas tanah ➢ Lama waktu proses legislasi di DPRD ➢ Koordinasi dengan OPD penyelenggara perizinan	➢ Belum adanya Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar untuk memberikan perizinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman ➢ Kerjasama dengan OPD penyelenggara perizinan belum optimal ➢ Perlu dilakukan verifikasi dan pembaruan data
	➢ Persentase cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Permenpera No. 22/2008 tentang SPM Perumahan Target nasional 70% tahun 2025		Koordinasi dengan OPD terkait data rumah tangga kurang mampu	Kerjasama dengan OPD terkait data rumah tangga kurang mampu
	➢ Persentase cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Permenpera No. 22/2008 tentang SPM Perumahan Target nasional 100% tahun 2025	Kapasitas untuk melaksanakan pembangunan/ peningkatan PSU secara menyeluruh sesuai tugas dan fungsi	➢ Koordinasi dengan OPD penyelenggara PSU air bersih, listrik rumah tangga, dan persampahan	➢ Data lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU belum lengkap dan valid. ➢ Belum ditetapkannya jalan lingkungan perumahan di



					Kabupaten Bengkulu Tengah ➤ Koordinasi dengan OPD terkait belum optimal
	➤ Persentase luas lahan bersertifikat	Permendagri No. 54/2010	Ketersediaan dana sertifikasi dan data tanah yang akan disertifikasi	Lama waktu proses pembuatan sertifikat di BPN	Belum optimalnya capaian luas lahan bersertifikat
	➤ Persentase penyelesaian kasus tanah Negara	Permendagri No. 54/2010	Kapasitas untuk memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Koordinasi dengan pihak yang berkonflik, BPN dan instansi lain yang terkait	Lama waktu proses penyelesaian konflik-konflik pertanahan
	➤ Persentase penyelesaian izin lokasi	Permendagri No. 54/2010	Kapasitas untuk memberikan rekomendasi izin lokasi	➤ Koordinasi dengan OPD terkait ➤ Perda RTRW masih dalam proses penetapan	Terhambatnya pemberian rekomendasi izin lokasi karena belum adanya Perda RTRW

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 (diolah).

3.2. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin masih diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2016-2021 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan RPJMD periode 2016-2021:

'TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA'

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandate yang diberikan. Adapun Misi Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas;
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat; dan
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan



rakyat.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :

1. **Pernyataan Misi ke-1:** Untuk mewujudkan misi ini Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berperan serta dalam program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur dan program peningkatan kapasitas sumber aparatur.
2. **Pernyataan Misi ke-2:** Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berperan serta dan terlibat dalam pemenuhan misi ke-2 melalui program pembangunan sistem pendaftaran tanah, program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, program penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan program pengembangan sistem informasi pertanahan.
3. **Pernyataan Misi ke-3:** Untuk mewujudkan misi ini Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berperan serta dan terlibat melalui pelaksanaan program pengembangan perumahan, program lingkungan sehat perumahan, program pemberdayaan komunitas perumahan, dan program pengembangan infrastruktur permukiman.

Pencapaian Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut diatas akan dipengaruhi oleh faktor-faktor baik penghambat maupun pendorong. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut.



Tabel 3.11
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju Dan Makmur Di Indonesia			
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1 : Mewujudkan penataan permukiman yang layak dan berkelanjutan			
	Program Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum adanya Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar untuk memberikan perizinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman ➢ Kerjasama dengan OPD penyelenggara perizinan belum optimal ➢ Perlu dilakukan verifikasi dan pembaruan data ➢ Kerjasama dengan OPD terkait data rumah tangga kurang mampu 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingkat pertumbuhan penduduk baik dari kelahiran maupun dari urbanisasi khususnya di kawasan perkotaan cukup tinggi ➢ Masyarakat kurang mampu belum memiliki bukti hak atas tanah ➢ Lama waktu proses legislasi di DPRD ➢ Koordinasi dengan OPD penyelenggara perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk melakukan pendataan rumah tidak layak huni ➢ Kapasitas untuk melakukan pemberian rekomendasi teknis di bidang perizinan perumahan dan kawasan permukiman
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sanitasi yang diselenggarakan terbatas sanitasi lingkungan perumahan ➢ Data rumah tangga bersanitasi tidak lengkap dan tidak terbaru ➢ Perubahan luas kawasan kumuh berdasarkan hasil identifikasi kegiatan RPKP2KK. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kesadaran masyarakat tentang sanitasi masih kurang ➢ Kesadaran masyarakat rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi cukup tinggi ➢ Hasil identifikasi terbaru luas kawasan kumuh berdasarkan dokumen RPKP2KPKP 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk melakukan pendataan rumah tangga bersanitasi ➢ SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Data lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU belum lengkap dan valid. ➢ Belum ditetapkannya jalan lingkungan perumahan di Kabupaten Bengkalis ➢ Koordinasi dengan OPD terkait belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk melaksanakan pembangunan/ peningkatan PSU secara menyeluruh sesuai tugas dan fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi dengan OPD penyelenggara PSU air bersih, listrik rumah tangga, dan persampahan
2.	Misi 2 : Mewujudkan akuntabilitas tata kelola pertanahan			
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Inventarisasi data pengadaan tanah Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi dengan pihak OPD yang mengadakan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk memberikan bantuan teknis dalam



			tanah dan instansi lain yang terkait	pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum optimalnya capaian luas lahan bersertifikat ➢ Terhambatnya pemberian rekomendasi izin lokasi karena belum adanya Perda RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Lama waktu proses pembuatan sertifikat di BPN ➢ Koordinasi dengan OPD terkait ➢ Perda RTRW masih dalam proses penetapan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketersediaan dana sertifikasi dan data tanah yang akan disertifikasi ➢ Kapasitas untuk memberikan rekomendasi izin lokasi
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Lama waktu proses penyelesaian konflik-konflik pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi dengan pihak yang berkonflik, BPN dan instansi lain yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Data pertanahan belum lengkap dan akurat 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tidak adanya surat hibah dari masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk melakukan pendataan
3. Misi 3 : Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintah yang baik				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kualitas SDM dibidang tugasnya masing-masing masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Keterbatasan penyelenggaraan bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing ASN 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingginya minat ASN untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengawasan dan pemeriksaan infrastruktur dan penataan masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kuantitas pembangunan infrastruktur makin bertambah dan kompleks
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Rendahnya audit probity 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Keterbatasan SDM internal dalam pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Adanya aturan yang mendukung kegiatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Minimnya pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara berjenjang 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kesadaran akan manajemen pelaporan yang minim 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan semakin kompleks dan terarah

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2017 (diolah).

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi Riau

3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten. Penyelenggaraan urusan wajib perumahan oleh pemerintah pusat berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG



Adapun pernyataan dari visi tersebut diatas adalah :

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dproduktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumberdaya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan dalam kerangka NKRI.
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi diatas, salah satu agenda prioritas terkait dengan perumahan adalah membangun perumahan dan kawasan permukiman yang dijabarkan kedalam kebijakan dan strategi penyediaan perumahan. Program-program yang dilaksanakan meliputi (1) pengendalian perumahan komersil, (2) penguatan perumahan umum, (3) pemberdayaan perumahan swadaya dan (4) fasilitas perumahan khusus.

Keterkaitan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dalam rangka



penyediaan rumah layak huni yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai. Berdasarkan keterkaitan antara Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dapat dilakukan identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang akan mempengaruhi baik faktor penghambat maupun faktor pendorong.

3.3.2 Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang merumuskan visi sebagai berikut:

**MENJADI LEMBAGA YANG MAMPU MEWUJUDKAN TANAH DAN
PERTANAHAN UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT, SERTA
Keadilan dan Berkelanjutan Sistem Kemasyarakatan, Kebangsaan
dan Kenegaraan Republik Indonesia**

Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang merupakan rumusan upaya-upaya dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
5. Memperkuat lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

Agar visi dan misi tercapai sesuai rencana, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menetapkan tujuan utama yaitu “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Adapun sasaran strategis dari tujuan tersebut sebagai berikut: (1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan, (2) Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dan (3) Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).



Keterkaitan antara Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah dibidang pertanahan dengan terselesaikannya konflik-konflik pertanahan, tersedianya peta tematik, dan fasilitas sertifikasi tanah. Berdasarkan keterkaitan antara Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dapat dilakukan identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang akan mempengaruhi baik faktor penghambat maupun faktor pendorong.

3.3.3 Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau baru dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 04 Tahun 2016, dengan visi:

TERWUJUDNYA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN YANG LAYAK, ADIL DAN BERKELANJUTAN”

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi visi, maka misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin;
2. Menyediakan Dan Memfasilitasi Rumah Korban Bencana Dan Terkena Relokasi Program Pemerintah;
3. Meningkatkan Kompetensi dan Kualifikasi Bagi Perencana dan Perancang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Mendorong Kemandirian Kab/Kota dan Memfasilitasi Penataan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Meningkatkan Penataan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman;
6. Peningkatan Kualitas Dan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman;
7. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan Bagi Kepentingan Umum;
8. Mendorong Percepatan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Bagi Kepentingan Umum; serta
9. Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Organisasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau menetapkan sasaran yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan melalui program: (1) Pengembangan infrastruktur perdesaan, (2) Pengembangan infrastruktur perkotaan, (3) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dan (4) Penyehatan lingkungan permukiman.

Keterkaitan antara Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dengan renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah dalam rangka:



1. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, korban bencana dan bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah;
2. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
3. Penyelenggaraan PSU permukiman;
4. Pemberian izin lokasi lintas daerah;
5. Penyelesaian sengketa tanah; dan
6. Inventarisasi tanah ulayah dan tanah kosong.

Uraian diatas sejalan dengan program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan telaah terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dapat diidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Tabel 3.12

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rumah tangga ber-sanitasi ➤ Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi 	12,17% -	- -	- 89%
2.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lingkungan permukiman kumuh ➤ Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan 	0,00 -	- -	- 0,00
3.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rumah layak huni ➤ Persentase penurunan rumah tidak layak huni 	100% -	- -	- 44,12%
4.	Cakupan rumah layak huni	100%	-	-
5.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau ➤ Tingkat pemenuhan rumah yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah 	60%	- -	- 89%



6.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum ➤ Tingkat kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman 	30% -	- -	- 100%
7.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase luas lahan bersertifikat ➤ Persentase jumlah tanah yang terdaftar 	20% -	- -	- 20%
8.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelesaian kasus tanah negara ➤ Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan 	30% -	- -	- 50%
9.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelesaian izin lokasi ➤ Persentase peningkatan kesesuaian rencana program pembangunan sektordengan rencana tata ruang 	23% -	- -	- 50%

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 (diolah).

Tabel 3.13
Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan)	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sanitasi yang diselenggarakan terbatas sanitasi lingkungan perumahan ➤ Data rumah tangga ber-sanitasi tidak lengkap dan tidak terbaru 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesadaran masyarakat tentang sanitasi masih kurang ➤ Kesadaran masyarakat rendah dan tingkat pertumbuhan pednuduk dan urbanisasi cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas untuk melakukan pendataan rumah tangga ber-sanitasi ➤
2.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan	➤ Perubahan luas kawasan kumuh berdasarkan hasil	➤ Hasil identifikasi	➤ SK Bupati tentang



	infrastruktur pemukiman	<p>identifikasi kegiatan RPKP2KPKP.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Data lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU belum lengkap dan valid. ➢ Belum ditetapkannya jalan lingkungan perumahan di Kabupaten Bengkalis ➢ Koordinasi dengan OPD terkait belum optimal 	<p>terbaru luas kawasan kumuh berdasarkan dokumen RPKP2KPKP</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk melaksanakan pembangunan/ peningkatan PSU secara menyeluruh sesuai tugas dan fungsi 	<p>Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi dengan OPD penyelenggara PSU air bersih, listrik rumah tangga, dan persampahan
3.	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum adanya Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar untuk memberikan perizinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman ➢ Kerjasama dengan OPD penyelenggara perizinan belum optimal ➢ Perlu dilakukan verifikasi dan pembaruan data ➢ Kerjasama dengan OPD terkait data rumah tangga kurang mampu 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingkat pertumbuhan penduduk baik dari kelahiran maupun dari urbanisasi khususnya di kawasan perkotaan cukup tinggi ➢ Masyarakat kurang mampu belum memiliki bukti hak atas tanah ➢ Lama waktu proses legislasi di DPRD ➢ Koordinasi dengan OPD penyelenggara perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk melakukan pendataan rumah tidak layak huni ➢ Kapasitas untuk melakukan pemberian rekomendasi teknis di bidang perizinan perumahan dan kawasan permukiman
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum optimalnya capaian luas lahan bersertifikat ➢ Terhambatnya pemberian rekomendasi izin lokasi karena belum adanya Perda RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Lama waktu proses pembuatan sertifikat di BPN ➢ Koordinasi dengan OPD terkait ➢ Perda RTRW masih dalam proses penetapan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketersediaan dana sertifikasi dan data tanah yang akan disertifikasi ➢ Kapasitas untuk memberikan rekomendasi izin lokasi
5.	Berkurangnya kasus pertanahan dan tata ruang (sengketa, konflik dan perkara)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Lama waktu proses penyelesaian konflik-konflik pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi dengan pihak yang berkonflik, BPN dan instansi lain yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 (diolah).



Tabel 3.14

Permasalahan pelayanan OPD berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi Riau	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum adanya Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar untuk memberikan perizinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman ➢ Kerjasama dengan OPD penyelenggara perizinan belum optimal ➢ Perlu dilakukan verifikasi dan pembaruan data ➢ Kerjasama dengan OPD terkait data rumah tangga kurang mampu 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingkat pertumbuhan penduduk baik dari kelahiran maupun dari urbanisasi khususnya di kawasan perkotaan cukup tinggi ➢ Masyarakat kurang mampu belum memiliki bukti hak atas tanah ➢ Lama waktu proses legislasi di DPRD ➢ Koordinasi dengan OPD penyelenggara perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk melakukan pendataan rumah tidak layak huni ➢ Kapasitas untuk melakukan pemberian rekomendasi teknis di bidang perizinan perumahan dan kawasan permukiman
2.	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja di lingkungan masyarakat			
3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan rumah layak huni			
4.	Meningkatnya hunian yang terbebas dari bencana alam			
5.	Terpenuhinya fasilitas penyediaan rumah yang terkena relokasi program pemerintah			
6.	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi bagi perencana dan perancang perumahan dan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum adanya pedoman di daerah yang mengatur tata cara pemberian sertifikasi bagi perencana dan perancang perumahan dan kawasan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pemahaman dan kesediaan perencana dan perancang untuk sertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kemampuan mengikutsertakan ASN yang mempunyai tugas dan fungsi penerbitan sertifikasi perencana dan perancang perumahan ikut sosialisasi, bimbingan teknik atau konsultasi tentang tata cara penerbitan sertifikat
7.	Meningkatnya kemampuan Kab/Kota dalam penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Perubahan luas kawasan kumuh berdasarkan hasil identifikasi kegiatan RPKP2KPKP. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hasil identifikasi terbaru luas kawasan kumuh berdasarkan dokumen RPKP2KPKP 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sk Bupati tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis
8.	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana dasar di kawasan permukiman strategis dan kumuh			
9.	Meningkatnya kualitas dan keterpaduan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Data lingkungan perumahan yang 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi dengan OPD



	prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	<p>sehat dan aman yang didukung PSU belum lengkap dan valid.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum ditetapkannya jalan lingkungan perumahan di Kabupaten Bengkalis ➤ Koordinasi dengan OPD terkait belum optimal 	melaksanakan pembangunan/ peningkatan PSU secara menyeluruh sesuai tugas dan fungsi	penyelenggara PSU air bersih, listrik rumah tangga, dan persampahan
10.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan pertanahan bagi kepentingan umum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inventarisasi data pengadaan tanah Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinasi dengan pihak OPD yang mengadakan tanah dan instansi lain yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas untuk memberikan bantuan teknis dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
11.	Meningkatkan penetapan lokasi, penetapan tanah ulayat, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absenteer lintas kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya capaian luas lahan bersertifikat ➤ Terhambatnya pemberian rekomendasi izin lokasi karena belum adanya Perda RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lama waktu proses pembuatan sertifikat di BPN ➤ Koordinasi dengan OPD terkait ➤ Perda RTRW masih dalam proses penetapan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketersediaan dana sertifikasi dan data tanah yang akan disertifikasi ➤ Kapasitas untuk memberikan rekomendasi izin lokasi
12.	Meningkatnya percepatan penyelesaian masalah tanah kosong dan tanah garapan yang hamparannya lintas batas kab/kota, serta menginventarisasi pemanfaatannya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lama waktu proses penyelesaian konflik-konflik pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinasi dengan pihak yang berkonflik, BPN dan instansi lain yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas untuk memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
13	Meningkatnya tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya koordinasi antara OPD Provinsi dengan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinasi dengan OPD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemampuan untuk berkoordinasi dan konsultasi

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 (diolah).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kabupaten Bengkalis ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2004. Pada tahun 2012 dilakukan revisi terhadap Perda RTRW dimaksud, namun pengesahan revisi Perda terkendala dengan belum ditetapkannya Perda RTRW Provinsi. Salah satu fungsi RTRW Kabupaten Bengkalis adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Keterkaitan RTRW Kabupaten Bengkalis



dengan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2033, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bengkalis meliputi: 1) sistem pusat kegiatan; dan 2) sistem jaringan prasarana. Sistem pusat kegiatan meliputi sistem pusat kegiatan perkotaan dan sistem pusat kegiatan perdesaan. Sistem pusat kegiatan perkotaan meliputi sistem Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Sistem Pusat Kegiatan Perdesaan meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

PKW sebagaimana dimaksud di atas berada diperkotaan Bengkalis berfungsi sebagai: 1) pusat pemerintahan kabupaten; 2) pusat perdagangan dan jasa serta transito di ASEAN; 3) pusat pendidikan lingkup regional, nasional dan di ASEAN; 4) kawasan industri berbasis agribisnis dan kelautan; 5) pusat pengembangan perikanan dan perkebunan; 6) pusat pengembangan dan pelestarian budaya Melayu; dan 7) sentra niaga dan lokasi pelabuhan penyeberangan.

PKWp sebagaimana dimaksud di atas berada diperkotaan Duri berfungsi sebagai: 1) pusat perwakilan pemerintahan Kabupaten khusus untuk melayani administrasi kegiatan perkotaan; 2) sentra perniagaan dan transito (perdagangan dan jasa); 3) pusat permukiman perkotaan; dan 4) lokasi kawasan industri berbasis pengolahan hasil migas serta pengolahan perkebunan.

PKL sebagaimana dimaksud di atas berada di Perkotaan Sungai Pakning berfungsi sebagai: 1) pusat pemerintahan Kecamatan; 2) pusat perdagangan dan jasa Kabupaten; 3) pusat pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan 4) lokasi pengolahan hasil migas dan pelabuhan khusus migas.

PKLp sebagaimana dimaksud di atas berada di Desa Tanjung Medang, Desa Selat Baru, Desa Pinggir dan Kelurahan Batu Panjang, berfungsi sebagai: 1) pusat pemerintahan Kecamatan; 2) pusat pengembangan pariwisata; 3) lokasi pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM); 4) pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan dan lintas batas negara; dan 5) kawasan industri berbasis agribisnis dan kelautan.

PPK sebagaimana dimaksud di atas berada di Desa Lubuk Muda dan Desa Pangkalan Nyirih, berfungsi sebagai: 1). pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan beberapa desa; 2). pusat pengembangan perikanan; 3). pusat pengembangan perkebunan; dan 4). pusat pengembangan pariwisata pantai;

Rencana pola ruang Kabupaten Bengkalis meliputi kawasan lindung dan kawasan



budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Penetapan struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Bengkalis berpengaruh pada pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.15
Hasil Telaahan RTRW Kabupaten Bengkalis

No.	Rencana Struktur Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
1.	Sistem Pusat Kegiatan: PKW PKWp PKL PKLp PPK	➤ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Harus dapat menjamin bahwa pusat-pusat kegiatan terhubungan melalui jaringan mobilitas dan didukung PSU yang memadai
2.	Sistem Prasarana Wilayah: Pengembangan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan jalan arteri primer ➤ Pengembangan jalan kolektor primer ➤ Pengembangan jalan local primer ➤ Pengembangan jalan arteri sekunder ➤ Pengembangan jalan kolektor sekunder ➤ Pembangunan jaringan jalan baru ➤ Pengendalian dan pengawasan jalan ➤ Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan 	Klasifikasi jalan lingkungan perumahan tidak termasuk dalam indikasi program pemanfaatan ruang
3.	Sistem Jaringan Drainase	➤ Pembangunan dan peningkatan prasarana drainase kawasan permukiman	Pembangunan dan peningkatan sesuai arahan tata ruang
4.	Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan MCK ➤ Pembangunan IPAL Komunal 	Pembangunan sesuai arahan tata ruang

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 (diolah).



Tabel 3.16
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

No.	Rencana Pola Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
1.	Perwujudan Kawasan Lindung	Pembatasan pendirian bangunan Melakukan pengamanan dan memindahkan permukiman yang berada di dalam kawasan-kawasan rawan bencana secara bertahap	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan ➤ Perizinan Kawasan Permukiman ➤ Izin Lokasi
2.	Perwujudan Kawasan Budidaya	Peningkatan sarana atau prasarana permukiman	

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 (diolah).

Setelah menelaah struktur dan pola ruang, berikut identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berdasarkan RTRW Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel 3.17
Komparasi terhadap telaah RTRW

No.	RTRW terkait tugas dan fungsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana struktur ruang dan Pola Ruang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terhambatnya pelayanan pemberian rekomendasi izin lokasi dan penatagunaan tanah ➤ Terhambatnya pelayanan pemberian izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum ditetapkannya Perda RTRW periode 2013-2033 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas untuk memberikan rekomendasi
2.	Sistem Prasarana Wilayah: ➤ Pengembangan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum ditetapkannya jalan lingkungan perumahan sebagai indikasi program arahan pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum ditetapkannya Perda RTRW periode 2013-2033 ➤ Belum adanya penetapan jalan lingkungan ➤ Data jalan lingkungan belum lengkap dan valid 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas untuk melakukan pendataan dan menyusun ketetapan jalan lingkungan
3.	➤ Sistem Jaringan Drainase	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum ada sistem pengelolaan drainase terpadu sehingga banyak terjadi genangan khususnya di kawasan permukiman perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum ada analisis potensi genangan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama yang baik dengan OPD terkait
4.	➤ Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Akses sanitasi masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya pengetahuan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumen masterplan dan DED air limbah



			tentang pengelolaan limbah ➢ Belum ada pihak swasta yang membangun IPAL Komunal	
--	--	--	--	--

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 (diolah).

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Identifikasi isu-isu strategis kemudian dipertajam dengan tinjauan KLHS. KLHS adalah rangkaian analisis-analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Program Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa KLHS wajib disertakan dalam penyusunan Renstra OPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Untuk dapat mengetahui hasil analisis terhadap dokumen KLHS dapat dilihat pada tabel 3.18 sebagai berikut:

Tabel 3.18
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan	Catatan bagi perumusan Program dan Kegiatan
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Program perencanaan tata ruang dapat membawa pengaruh negative (contoh kerusakan lingkungan) jika alokasi ruang tidak disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung	Alih fungsi lahan tidak boleh mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	➢ Penataangunaan dan pemanfaatan tanah disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung. ➢ Penerapan konsep <i>green environmental</i> pada program lingkungan sehat perumahan
Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Dampak dan resiko lingkungan hidup akibat pembangunan antara lain peningkatan <i>run off</i> , pengurangan area resapan termasuk RTH, peningkatan limbah dan pencemaran.	Kajian dampak dan resiko lingkungan hidup sebagai bagian dari perizinan sebelum program pembanhunan dilaksanakan	Kontrol dan pengawasan terhadap persyaratan perizinan lingkungan untuk setiap pembangunan PSU dan perumahan
Kinerja layanan/jasa ekosistem	Program pembangunan prasarana dan sarana berpotensi alih fungsi lahan dan mengurangi ruang terbuka hijau yang menjaga keseimbangan ekosistem	Alokasi ruang terbuka hijau 30% dalam rencana tata ruang perlu dipenuhi dan dijaga agar tidak terjadi alih fungsi lahan	Pembangunan taman dan jalur hijau
Efisiensi pemanfaatan	Pembangunan prasarana dan sarana	Program pembangunan menggunakan konsep	Penerapan konsep <i>green building</i> pada pembangunan



sumber daya alam	infrastruktur berpotensi memicu alih fungsi lahan dan urbanisasi yang berakibat pada penurunan muka air tanah dan pencemaran lingkungan	hemat energy sehingga tercapai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	perumahan dan <i>green infrastructure</i> pada pembangunan PSU
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pembangunan perumahan serta PSU berpotensi meningkatkan <i>run off</i> dan mengurangi ruang terbuka hijau	Pembangunan perumahan dan PSU mempertimbangkan kapasitas terhadap perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pembangunan perumahan yang ramah lingkungan ➢ System drainase lingkungan perumahan terintegrasi dengan jaringan drainase perkotaan (primer dan sekunder) ➢ Perlunya sosialisasi lingkungan sehat perumahan
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Adanya potensi alih fungsi lahan	Intensitas program dan kegiatan penatagunaan tanah dan pemanfaatan tanah	Pengawasan dan pengendalian pemberian rekomendasi teknis izin lokasi, izin pembangunan perumahan dan izin pemanfaatan tanah

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 (diolah).

Berdasarkan telaah diatas, terdapat beberapa aspek yang berpengaruh terhadap bidang kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Namun Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tidak memberikan kontribusi secara langsung melalui program dan kegiatan yang menjadi prioritas. Meskipun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan dengan konsep yang menekankan pada harmonisasi dengan alam dan diperketat dengan proses kajian dampak lingkungan sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan.

3.6 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati; telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi, serta telaah RTRW dan KLHS dapat dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi OPD dari faktor-faktor eksternal lainnya. Secara lebih spesifik, isu-isu strategis tersebut dapat diidentifikasi berdasar isu strategis pada lingkup internasional, nasional ataupun regional/local pada tabel 3.19 sebagai berikut:

Tabel 3.19
Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis (<i>Strategic issues</i>)		
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan pendapatan
Perubahan Iklim	Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan	Peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat perekonomian daerah dengan berbasis ekonomi rakyat dan potensi sumberdaya alam yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, percepatan pembangunan



		infrastruktur sehingga tersedia jaringan infrastruktur yang handal di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis, dan peningkatan kemampuan aparatur
Terorisme	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan	penataan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan menyelenggarakan penegakkan hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dan pembangunan budaya politik
Perdagangan Orang (Trafficking)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang memiliki peran penting di lingkungan regional, nasional dan internasional, dengan mengembangkan kerjasama, pengembangan wilayah perbatasan dan meningkatkan investasi dari luar
Post 2015 Development Agenda	Penyiapan Landasan Pembangunan Yang Kokoh	Pembentukan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya, dengan mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, dan pengembangan nilai-nilai Budaya Melayu
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan	
	Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah	

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 (diolah).

Isu-isu strategis yang merupakan prioritas yang penanganannya dilakukan melalui program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis ditandai dengan isu yang sering ditemui dalam telaah-telaah sebelumnya. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dari masing-masing bidang kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 3.20 sebagai berikut.

Tabel 3.20
Isu-isu Strategis yang Menjadi Prioritas

Unit Kerja	Aspek	Permasalahan	Lokasi	Rekomendasi Prioritas Kegiatan
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lingkungan Permukiman Kumuh	Terdapat 180,33 Ha kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kawasan Perkotaan Bengkalis – Parit Bangkong Damon – Cik Mas Ayu – Kelapapati ➤ Kawasan perkotaan Mandau – Duri Barat – Batang Serosa – Balik Alam ➤ Desa Pinggir ➤ Kelurahan Batu Panjang ➤ Kelurahan Sungai Pakning ➤ Kawasan pasar baru Lubuk Muda ➤ Kawasan Pantai Indah Selatbaru ➤ Kawasan permukiman nelayan 	Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan



			– Tanjung Medang	
	Penyediaan rumah layak huni	Terdapat ± 10% masyarakat tidak mampu belum menempati rumah layak huni	➤ Kelurahan/Desa se Kabupaten Bengkalis	➤ Pembangunan rumah layak huni ➤ Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
Bidang PSU	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang memadai	Terdapat lingkungan perumahan yang belum didukung PSU yang memadai	➤ Kelurahan/Desa se Kabupaten Bengkalis	➤ Pembangunan/ peningkatan PSU jalan lingkungan kawasan perumahan ➤ Pembangunan dan pemeliharaan PJU ➤ Pembangunan dan pemeliharaan pedestrian ➤ Pembangunan dan pemeliharaan taman
	Rumah tangga ber-sanitasi	Masih terdapat rumah tangga yang belum dapat mengakses sanitasi perumahan	➤ Kelurahan/Desa se Kabupaten Bengkalis	➤ Pembangunan IPAL komunal ➤ Pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan perumahan
Bidang Pertanahan	Lahan bersertifikat	Terdapat tanah Pemerintah Daerah dan tanah masyarakat kurang mampu yang belum bersertifikat	➤ Kabupaten Bengkalis	➤ Fasilitasi sertifikasi tanah ➤ Inventarisasi tanah yang belum bersertifikat
	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Adanya sengketa, kasus dan konflik penatagunaan tanah dan tanah	➤ Sesuai pengaduan	➤ Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
	Izin lokasi	Terkendalanya pemberian rekomendasi teknis izin lokasi akibat belum ditetapkannya Perda RTRW	➤ Sesuai permohonan	

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 (diolah).

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, terdapat beberapa faktor penyebab yang sangat strategis bagi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan dapat



melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga pencapaian kinerja akan lebih optimal.

Analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 3.21 sebagai berikut:



Berdasarkan kondisi di atas, kapasitas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga yang memberikan layanan pemenuhan infrastruktur dan perumahan kepada masyarakat yang masih perlu terus dilakukan peningkatan agar pencapaian kinerja dimasa mendatang lebih baik sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Ada 3 (tiga) isu-isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Bengkalis sesuai dengan peran dan kewenangan agar terpenuhi infrastruktur dan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
(kuantitas dan kualitas Rumah Layak Huni dan Penataan Kawasan Permukiman);
2. Masih belum optimalnya penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)
(Penyediaan infrastruktur permukiman dan sanitasi);
3. Masih belum optimalnya pelayanan dibidang pertanian
(pelayanan dibidang pertanian);



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan menetapkan Visi dan Misi. Adapun Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu: 1). *Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas*, 2). *Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat*, dan 3). *Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat*. Dari ke-3 (tiga) Misi tersebut, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis mendukung *misi 2* dan *misi 3* sesuai tugas pokok dan fungsi.

Selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menetapkan visi sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA PERMUKIMAN YANG LAYAK
BERKELANJUTAN, DAN TATA KELOLA
PERTANAHAN YANG AKUNTABEL**

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi di atas adalah:

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Layak adalah lingkungan hunian yang pantas untuk ditempati oleh masyarakat, sehat, aman dan nyaman sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat.

Berkelanjutan adalah permukiman sebagai tempat untuk membangun budaya maju oleh pemerintah dan masyarakatnya (masyarakat dan swasta) secara terus menerus dengan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan.

Tata kelola pertanahan adalah manajemen dan system administrasi pertanahan diselenggarakan dengan efektif, efisien, terbuka dan tertib.

Akuntabel adalah penyelenggaraan manajemen dan system administrasi pertanahan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Visi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tersebut diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) misi yaitu:



1. Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan;
2. Mewujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Pertanahan; serta
3. Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintah yang Baik.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah dilakukan berdasarkan hasil analisa bab sebelumnya. Perumusan tujuan akan berfungsi sebagai panduan dengan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan.

4.3. Isu-Isu Strategis

Perumusan tujuan jangka menengah kemudian diterjemahkan kedalam sasaran pelayanan sebagai suatu pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun. Perumusan sasaran dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, meliputi indikator kinerja utama bidang perumahan maupun Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR/TUJUAN/SASARAN	TERGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)
Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan							
1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1.1 Meningkatkan kualitas PSU Permukiman	1.1.1 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	12%	15%	20%	25%	30%
	1.2 Meningkatkan kualitas permukiman yang tertata	1.2.1 Persentase Lingkungan permukiman kumuh	0.0046%	0.0046%	0.0046%	0.0046%	0.0046%
	1.3 Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	1.3.1 Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	100%	100%	100%	100%	100%
Mewujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Pertanahan							
2. Meningkatkan kualitas kepemilikan tanah pemerintah	2.1 Meningkatkan administrasi kepemilikan tanah pemerintah	2.1.1 Persentase luas lahan bersertifikat	20%	40%	60%	80%	100%
	2.2 Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan	2.2.2 Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	10%	25%	50%	75%	100%
Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintah yang baik							
3. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	3.1 Meningkatkan kualitas capaian kinerja	3.1.1 Nilai akuntabilitas kinerja	CC	B	B	B	BB

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 (diolah).



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dan kebijakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Ka Bengkalis harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang RPJMD Kabupaten Bengkalis. Perumusan strategi dibahas melalui diskusi kelompok terarah lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dengan memperhatikan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan strategi diperjelas dengan rumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	TERWUJUDNYA PERMUKIMAN YANG LAYAK BERKELANJUTAN, DAN TATA KELOLA PERTANAHAN YANG AKUNTABEL		
MISI 1: Mewujudkan penataan permukiman yang layak dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas PSU Permukiman	Peningkatan prasarana dan sarana dan utilitas umum	Pembangunan dan penataan prasarana dan sarana utilitas umum
	Meningkatnya kualitas permukiman yang tertata	Peningkatan kualitas lingkungan sehat perumahan	Penataan lingkungan perumahan yang sehat dan aman
	Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	Pemenuhan rumah layak huni	Pembangunan rumah layak huni yang berkualitas
MISI 2 : Mewujudkan akuntabilitas tata kelola pertanahan			
Meningkatkan kualitas kepemilikan tanah pemerintah	Meningkatnya administrasi kepemilikan tanah pemerintah	Peningkatan pendataan kepemilikan tanah pemerintah	Melaksanakan sertifikasi tanah pemerintah daerah
	Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan	Peningkatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
MISI 3: Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintah yang baik			
Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Peningkatan tata kelola dan manajemen pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola manajemen yang akuntabel

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 (diolah).



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan diterjemahkan kedalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Pada bidang kesekretariatan, prioritas program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan, sistem pelaporan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, program dan kegiatan diprioritaskan pada penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu melalui program pengembangan perumahan, dan penataan kawasan kumuh melalui program lingkungan sehat perumahan.

Pada bidang prasarana dan sarana utilitas umum (PSU), program dan kegiatan difokuskan pada pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana utilitas (PSU) melalui program pengembangan infrastruktur permukiman, program lingkungan sehat perumahan dan program pemberdayaan komunitas perumahan. Pada bidang pertanahan, program dan kegiatan difokuskan pada inventarisasi dan sertifikasi serta system administrasi pertanahan yang tertib melalui program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selain program dan kegiatan prioritas tersebut, program dan kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tetap menjadi bagian dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Renstra 2017-2021 dilihat pada lampiran 1.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Pelaksanaan rumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui *review* terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021, telah dirumuskan 6 tujuan dan 11 sasaran. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas dan fungsi mempunyai keterkaitan langsung Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 melalui program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat diukur melalui indikator dan target kinerja. Seperti yang telah dijabarkan pada bab V, terdapat 32 indikator kinerja yang akan dilaksanakan melalui 13 Program. Indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	45%	48%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	
2.	Persentase luas permukiman yang tertata	10,34%	10,65%	10,96%	11,28%	11,59%	11,90%	12,21%	12,21%	
3.	Persentase rumah tinggal bersantiasi	7,1%	7,31%	11,20%	11,58%	11,77%	11,97%	12,17%	12,17%	
4.	Rumah layak huni	60,35%	62,17%	96,21%	96,59%	96,96%	97,32%	97,66%	97,66%	

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2016-2021.



LAMPIRAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2016-2021
KABUPATEN BENGKALIS

VISI : TERWUJUDNYA PERMUKIMAN YANG LAYAK BERKELANJUTAN, DAN TATA KELOLA PERTANAHAN YANG AKUNTABEL
MISI : 1. MEWUJUDKAN PENATAAN PERMUKIMAN YANG LAYAK DAN BERKELANJUTAN
2. MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PERTANAHAN
3. MEWUJUDKAN SISTEM MANEJEMEN DAN PEMERINTAH YANG BAIK

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Ex. Tah 2016	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
						2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	(Rp)	
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1. Meningkatkan Penataan Permukiman Sehat dan Aman	1.1 Meningkatkan Kualitas PSU Permukiman	1.1.1 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	-	100%	-	100%	263.000.000.000	100%	362.600.000.000	100%	330.600.000.000	100%	446.630.000.000	100%	1.283.630.000.000	
			1. Pembangunan/Peningkatan PSU Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Persentase peningkatan kawasan permukiman di kawasan strategis	-	0	-	0%	-	0%	-	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	10.000.000.000	
			2. Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun Bengkalis	-	0	-	1 Kawasan	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	1 Kawasan	5.000.000.000	1 Kawasan	20.000.000.000	
			3. Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Bantan	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bantan	-	0	-	1 Kawasan	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	1 Kawasan	5.000.000.000	1 Kawasan	20.000.000.000	
			4. Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bukit Batu	-	0	-	1 Kawasan	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	1 Kawasan	5.000.000.000	1 Kawasan	20.000.000.000	
			5. Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Siak Kecil	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Siak Kecil	-	0	-	1 Kawasan	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	1 Kawasan	5.000.000.000	1 Kawasan	20.000.000.000	
			6. Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Rupat	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Rupat	-	0	-	1 Kawasan	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	1 Kawasan	5.000.000.000	1 Kawasan	20.000.000.000	
			7. Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Rupat Utara	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Rupat Utara	-	0	-	1 Kawasan	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	1 Kawasan	5.000.000.000	1 Kawasan	20.000.000.000	
			8. Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Mandau	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Mandau	-	0	-	1 Kawasan	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	1 Kawasan	5.000.000.000	1 Kawasan	20.000.000.000	
			9. Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Pinggir	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Pinggir	-	0	-	1 Kawasan	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	1 Kawasan	5.000.000.000	1 Kawasan	20.000.000.000	
			10. Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Bandar Laksamana	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bandar Laksamana	-	0	-	1 Kawasan	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	1 Kawasan	5.000.000.000	1 Kawasan	20.000.000.000	
			11. Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Bathin Solapan	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bathin Solapan	-	0	-	1 Kawasan	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	1 Kawasan	5.000.000.000	1 Kawasan	20.000.000.000	
			12. Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kecamatan Talang Muandau	Tersedianya Taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Talang Muandau	-	0	-	1 Kawasan	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	1 Kawasan	5.000.000.000	1 Kawasan	20.000.000.000	
			13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kecamatan Bengkalis	Persentase Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang tersedia dalam dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bengkalis	-	0	-	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	20%	18.000.000.000	
			14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kecamatan Bantan	Persentase Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang tersedia dalam dalam 1 (satu) Tahun Bantan	-	0	-	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	20%	18.000.000.000	
			15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kecamatan Bukit Batu	Persentase Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang tersedia dalam dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bukit Batu	-	0	-	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	20%	18.000.000.000	
			16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kecamatan Siak Kecil	Persentase Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang tersedia dalam dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Siak Kecil	-	0	-	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	20%	18.000.000.000	
			17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kecamatan Rupat	Persentase Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang tersedia dalam dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Rupat	-	0	-	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	20%	18.000.000.000	
			18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kecamatan Rupat Utara	Persentase Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang tersedia dalam dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Rupat Utara	-	0	-	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	20%	18.000.000.000	
			19. Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kecamatan Mandau	Persentase Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang tersedia dalam dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Mandau	-	0	-	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	20%	18.000.000.000	
			20. Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kecamatan Pinggir	Persentase Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang tersedia dalam dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Pinggir	-	0	-	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	20%	18.000.000.000	
			21. Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kecamatan Bandar Laksamana	Persentase Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang tersedia dalam dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bandar Laksamana	-	0	-	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	20%	18.000.000.000	
			22. Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kecamatan Bathin Solapan	Persentase Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang tersedia dalam dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bathin Solapan	-	0	-	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	20%	18.000.000.000	
			23. Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kecamatan Talang Muandau	Persentase Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang tersedia dalam dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Talang Muandau	-	0	-	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	5%	4.500.000.000	20%	18.000.000.000	
			24. Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman	Terpeliharanya Prasarana dan sarana taman dalam 1 (satu) Tahun	-	0	-	1 Tahun	1.000.000.000	1 Tahun	1.000.000.000	1 Tahun	1.000.000.000	1 Tahun	1.000.000.000	1 Tahun	4.000.000.000	
			25. Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman	Jumlah honorarium yang dibayarkan kepada pengawas lapangan, Tenaga Harian Lepas (THL), penjaga eset, teknis) listrik dan supir pertamanan dalam 1 (satu) tahun	-	0	-	180 Orang	5.000.000.000	180 Orang	5.000.000.000	180 Orang	5.000.000.000	180 Orang	5.000.000.000	180 Orang	20.000.000.000	
			26. Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Bengkalis	Penjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bengkalis	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000	
			27. Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Bantan	Penjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bantan	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000	
			28. Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Bukit Batu	Penjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bukit Batu	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000	
			29. Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Siak Kecil	Penjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Siak Kecil	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000	
			30. Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Rupat	Penjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Rupat	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000	
			31. Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Rupat Utara	Penjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Rupat Utara	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000	
			32. Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Mandau	Penjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Mandau	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000	
			33. Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Pinggir	Penjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Pinggir	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000	
			34. Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Bandar Laksamana	Penjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bandar Laksamana	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000	
			35. Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Bathin Solapan	Penjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bathin Solapan	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000	

26	Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Bengkalis	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bengkalis	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000
27	Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Bantan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bantan	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000
28	Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Bukit Batu	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bukit Batu	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000
29	Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Slak Kecil	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Slak Kecil	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000
30	Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Rupat	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Rupat	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000
31	Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Rupat Utara	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Rupat Utara	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000
32	Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Mandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Mandau	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000
33	Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Pinggir	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Pinggir	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000
34	Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Bandar Laksamana	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bandar Laksamana	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000
35	Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Bathin Solapan	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000
36	Pembangunan sarana dan prasarana PUJ Kecamatan Talang Muandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PUJ) dalam 1 (satu) Tahun Kecamatan Talang Muandau	-	0	-	2,21Km	5.000.000.000	2,85Km	7.000.000.000	3,49Km	10.000.000.000	4,13Km	15.000.000.000	12,68 Km	37.000.000.000
37	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman	Terpeliharanya Prasarana dan sarana taman dalam 1 (satu) Tahun	-	0	-	12 Bulan	1.500.000.000	12 Bulan	2.000.000.000	12 Bulan	2.500.000.000	12 Bulan	3.000.000.000	12 Bulan	9.000.000.000
38	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PUJ Kab Bengkalis	Terboayanya kewajiban rutin listrik, meterisasi dan air untuk PUJ dan taman dalam 1 (satu) tahun	-	0	-	12 Bulan	25.000.000.000	12 Bulan	30.000.000.000	12 Bulan	32.500.000.000	12 Bulan	35.000.000.000	12 Bulan	122.500.000.000
39	Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman	Jumlah honorarium yang dibayarkan kepada pegawai lapangan, Tenaga Harian Lepas (THL), penjaga aset, teknisi listrik dan supir pertamanan dalam 1 (satu) tahun	-	0	-	12 Bulan	4.000.000.000	12 Bulan	6.000.000.000	12 Bulan	8.000.000.000	12 Bulan	10.000.000.000	12 Bulan	28.000.000.000
40	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Bengkalis A	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	21 km	7.500.000.000	7 km	5.000.000.000	7 km	10.000.000.000	35 Km	25.000.000.000
41	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Bengkalis B	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	21 km	7.500.000.000	7 km	5.000.000.000	7 km	10.000.000.000	35 Km	25.000.000.000
42	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Bantan A	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	5.000.000.000	28 Km	15.000.000.000
43	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Bantan B	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	5.000.000.000	28 Km	15.000.000.000
44	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Bukit Batu A	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	5.000.000.000	28 Km	15.000.000.000
45	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Bukit Batu B	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	5.000.000.000	28 Km	15.000.000.000
46	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Slak Kecil A	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	3.000.000.000	28 Km	13.000.000.000
47	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Slak Kecil B	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	3.000.000.000	28 Km	13.000.000.000
48	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Rupat A	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	2.500.000.000	28 Km	12.500.000.000
49	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Rupat B	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	2.500.000.000	28 Km	12.500.000.000
50	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Rupat Utara A	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	2.500.000.000	28 Km	12.500.000.000
51	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Rupat Utara B	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	2.500.000.000	28 Km	12.500.000.000
52	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Mandau A	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	21 km	7.500.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	12.000.000.000	35 Km	24.500.000.000
53	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Mandau B	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	21 km	7.500.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	12.000.000.000	35 Km	24.500.000.000
54	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Pinggir A	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	21 km	7.500.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	10.000.000.000	35 Km	22.500.000.000
55	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Pinggir B	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	21 km	7.500.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	10.000.000.000	35 Km	22.500.000.000
56	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Bathin Solapan A	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	2.500.000.000	28 Km	12.500.000.000
57	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Bathin Solapan B	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	2.500.000.000	28 Km	12.500.000.000
58	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Bandar Laksamana A	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	2.500.000.000	28 Km	12.500.000.000
59	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Bandar Laksamana B	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	2.500.000.000	28 Km	12.500.000.000
60	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Talang Muandau A	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	2.500.000.000	28 Km	12.500.000.000
61	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kec. Talang Muandau B	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	-	0	-	7,1 km	2.500.000.000	14 km	5.000.000.000	7 km	2.500.000.000	7 km	2.500.000.000	28 Km	12.500.000.000
62	Penyediaan Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi	Terwujudnya Dana Pendamping DAK Sanitasi	-	100%	2.000.000.000	3 Lokasi	2.000.000.000	3 Lokasi	2.000.000.000	3 Lokasi	2.000.000.000	3 Lokasi	2.000.000.000	3 Lokasi	10.000.000.000
63	Penyusunan Dokumen Updating Strategi Sanitasi Kabupaten (ESK)	Tersedianya Dokumen Strategi Sanitasi Kab. Bengkalis	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	80.000.000
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			Persentase Peningkatan lingkungan yang sehat dan aman didukung P&U	100%	48.148.811.847	0	12.800.000.000	0	11.600.000.000	0	12.100.000.000	0	12.100.000.000	100%	94.448.811.847
1	Pemeliharaan rutin/berkala keindahan kota	Persentase terpeliharanya keindahan kota dalam 1 (satu) Tahun di Kab. Bengkalis	-	100%	25.999.808.300	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	25.999.808.300
2	Peningkatan Sarana Keindahan Kota untuk taman Kota	Persentase prasarana dan sarana taman yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun di Kab. Bengkalis	-	100%	1.709.466.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.709.466.500
3	Peningkatan Sarana Keindahan Kota se Kabupaten Bengkalis	Persentase optimalnya kinerja pelayanan keindahan kota di Kab. Bengkalis	-	100%	4.061.776.600	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	4.061.776.600
4	Peningkatan Sarana Keindahan Kota Kabupaten Bengkalis	Persentase tersedianya prasarana dan sarana publik perkotaan Kab. Bengkalis	-	100%	2.294.367.382	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.294.367.382
5	Peningkatan Sarana Keindahan Kota Kecamatan Bengkalis	Persentase tersedianya prasarana dan sarana publik perkotaan Kab. Bengkalis	-	100%	2.898.983.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.898.983.500
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keindahan kota	Persentase sarana dan prasarana keindahan kota yang terpelihara di Kab. Bengkalis	-	100%	1.426.558.600	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.426.558.600
7	Peningkatan Sarana Keindahan Kota untuk penerangan jalan umum (PUJ) Kec. Bantan	Persentase ruas Penerangan Jalan Umum (PUJ) yang tersedia di Ibukota Kec. Bantan	-	100%	994.781.230	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	994.781.230
8	Peningkatan Sarana Keindahan Kota untuk penerangan jalan umum (PUJ) Kec. Bukit Batu	Persentase ruas Penerangan Jalan Umum (PUJ) yang tersedia di Ibukota Kec. Bukit Batu	-	100%	694.680.338	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	694.680.338
9	Peningkatan Sarana Keindahan Kota untuk penerangan jalan umum (PUJ) Kec. Slak Kecil	Persentase ruas Penerangan Jalan Umum (PUJ) yang tersedia di Ibukota Kec. Slak Kecil	-	100%	990.394.605	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	990.394.605
10	Peningkatan Sarana Keindahan Kota untuk penerangan jalan umum (PUJ) Kec. Rupat	Persentase ruas Penerangan Jalan Umum (PUJ) yang tersedia di Ibukota Kec. Rupat	-	100%	990.783.350	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	990.783.350
11	Peningkatan Sarana Keindahan Kota untuk penerangan jalan umum (PUJ) Kec. Mandau	Persentase ruas Penerangan Jalan Umum (PUJ) yang tersedia di Ibukota Kec. Mandau	-	100%	1.496.532.890	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.496.532.890
12	Peningkatan Sarana Keindahan Kota untuk penerangan jalan umum (PUJ) Kec. Pinggir	Persentase ruas Penerangan Jalan Umum (PUJ) yang tersedia di Ibukota Kec. Pinggir	-	100%	993.595.784	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	993.595.784

12	Peningkatan Saranan Keindahan Kota untuk penerangan jalan umum (PJU) Kec.Pinggir	Persentase ruas Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersedia di Ibukota Kec.Pinggir	-	100%	993.595.784	-	-	-	-	-	-	-	100%	993.595.784	
13	Peningkatan Saranan Keindahan Kota untuk penerangan jalan umum (PJU) Kec.Bengkalis	Persentase ruas Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersedia di Ibukota Kec.Bengkalis	-	100%	997.595.868	-	-	-	-	-	-	-	100%	997.595.868	
14	Revitasi Kawasan Pemukiman Kec.Bengkalis	Tersedianya kawasan pemukiman yang tertata	-	100%	499.237.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	499.237.000	
15	Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Pembangunan dan pemeliharaan pedestrian/trotoar dan ruang tunggu siswa Kab.Bengkalis	-	0%	-	12 Km	10.000.000.000	12 Km	10.000.000.000	12 Km	10.000.000.000	12 Km	10.000.000.000	48 Km	40.000.000.000
16	Survei dan pendataan PSU perumahan dan kawasan pemukiman	Data PSU perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Bengkalis	-	100%	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	600.000.000
17	Penyusunan Masterplan Taman Kawasan Perumahan	Dokumen Masterplan taman kawasan pemukiman	-	0%	-	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	4.000.000.000
18	Pembangunan Wahana Permainan Anak	Tersedianya Ruang Publik Kota Ramah Anak	-	0%	-	5 Unit	750.000.000	3 Unit	200.000.000	5 Unit	750.000.000	5 Unit	750.000.000	18 Unit	2.450.000.000
19	Perencanaan Taman Kecamatan Rupat	Tersedianya Dokumen Perencanaan Taman di Kecamatan Rupat	-	0%	-	1 Dokumen	750.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	1.350.000.000
Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman			-	100%	205.851.054.280	100%	628.000.000.000	100%	628.000.000.000	100%	628.600.000.000	100%	628.260.000.000	100%	2.318.451.054.280
1	Pembangunan prasarana dan sarana Pertamanan Kec.Bukit Batu	Persentase terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec.Bukit Batu	-	4,00%	237.010.338	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	237.010.338	
2	Pembangunan prasarana dan sarana Pertamanan Kec.Siak Kecil	Persentase terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec.Siak Kecil	-	4,00%	237.798.434	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	237.798.434	
3	Pembangunan prasarana dan sarana Pertamanan Kec.Bengkalis	Persentase terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec.Bengkalis	-	4,00%	349.936.005	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	349.936.005	
4	Pembangunan prasarana dan sarana Pertamanan Kec.Bantan	Persentase terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec.Bantan	-	4,00%	232.097.159	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	232.097.159	
5	Pembangunan prasarana dan sarana Pertamanan Kec.Rupat	Persentase terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec.Rupat	-	4,00%	193.432.430	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	193.432.430	
6	Pembangunan prasarana dan sarana Pertamanan Kec.Rupat Utara	Persentase terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec.Rupat Utara	-	4,00%	198.649.418	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	198.649.418	
7	Pembangunan prasarana dan sarana Pertamanan Kec.Mandau	Persentase terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec.Mandau	-	4,00%	348.988.608	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	348.988.608	
8	Pembangunan prasarana dan sarana Pertamanan Kec.Pinggir	Persentase terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec.Pinggir	-	4,00%	2.571.305.208	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	2.571.305.208	
9	Infrastruktur Kawasan Pemukiman Pedesaan Kec.Rupat	Terbangunnya Infrastruktur Pemukiman Dalam 1 (Satu) Tahun	-	10,96%	31.753.885.000	-	-	-	-	-	-	-	10,96%	31.753.885.000	
10	Infrastruktur Kawasan Pemukiman Pedesaan Kec.Rupat Utara	Terbangunnya Infrastruktur Pemukiman Dalam 1 (Satu) Tahun	-	10,96%	6.624.429.000	-	-	-	-	-	-	-	10,96%	6.624.429.000	
11	Infrastruktur Kawasan Pemukiman Pedesaan Kec.Mandau	Terbangunnya Infrastruktur Pemukiman Dalam 1 (Satu) Tahun	-	10,96%	76.036.751.000	-	-	-	-	-	-	-	10,96%	76.036.751.000	
12	Infrastruktur Kawasan Pemukiman Pedesaan Kec.Bengkalis	Terbangunnya Infrastruktur Pemukiman Dalam 1 (Satu) Tahun	-	10,96%	24.169.770.000	-	-	-	-	-	-	-	10,96%	24.169.770.000	
13	Infrastruktur Kawasan Pemukiman Pedesaan Kec.Bantan	Terbangunnya Infrastruktur Pemukiman Dalam 1 (Satu) Tahun	-	10,96%	9.789.040.000	-	-	-	-	-	-	-	10,96%	9.789.040.000	
14	Infrastruktur Kawasan Pemukiman Pedesaan Kec.Bukit Batu	Terbangunnya Infrastruktur Pemukiman Dalam 1 (Satu) Tahun	-	10,96%	10.775.320.000	-	-	-	-	-	-	-	10,96%	10.775.320.000	
15	Infrastruktur Kawasan Pemukiman Pedesaan Kec.Pinggir	Terbangunnya Infrastruktur Pemukiman Dalam 1 (Satu) Tahun	-	10,96%	29.894.081.680	-	-	-	-	-	-	-	10,96%	29.894.081.680	
16	Infrastruktur Kawasan Pemukiman Pedesaan Kec.Siak Kecil	Terbangunnya Infrastruktur Pemukiman Dalam 1 (Satu) Tahun	-	10,96%	12.268.560.000	-	-	-	-	-	-	-	10,96%	12.268.560.000	
17	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Rupat A	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	31 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	67,4 Km	32.000.000.000
18	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Rupat B	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	31 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	67,4 Km	32.000.000.000
19	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Rupat C	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	31 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	67,4 Km	32.000.000.000
20	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Rupat D	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	31 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	67,4 Km	32.000.000.000
21	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Rupat E	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	31 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	67,4 Km	32.000.000.000
22	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Rupat F	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	31 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	67,4 Km	32.000.000.000
23	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Rupat Utara A	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	11,4 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	47,8 Km	32.000.000.000
24	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Rupat Utara B	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	11,4 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	47,8 Km	32.000.000.000
25	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Rupat Utara C	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	11,4 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	47,8 Km	32.000.000.000
26	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Rupat Utara D	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	11,4 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	47,8 Km	32.000.000.000
27	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Rupat Utara E	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	11,4 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	47,8 Km	32.000.000.000
28	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Rupat Utara F	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	11,4 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	47,8 Km	32.000.000.000
29	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Mandau A	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	14,2 km	8.000.000.000	43 km	8.000.000.000	19 km	8.000.000.000	19 km	8.000.000.000	95,2 Km	32.000.000.000
30	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Mandau B	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	14,2 km	8.000.000.000	43 km	8.000.000.000	19 km	8.000.000.000	19 km	8.000.000.000	95,2 Km	32.000.000.000
31	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Mandau C	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	14,2 km	8.000.000.000	43 km	8.000.000.000	19 km	8.000.000.000	19 km	8.000.000.000	95,2 Km	32.000.000.000
32	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Mandau D	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	14,2 km	8.000.000.000	43 km	8.000.000.000	19 km	8.000.000.000	19 km	8.000.000.000	95,2 Km	32.000.000.000
33	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Mandau E	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	14,2 km	8.000.000.000	43 km	8.000.000.000	19 km	8.000.000.000	19 km	8.000.000.000	95,2 Km	32.000.000.000
34	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Mandau F	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	14,2 km	8.000.000.000	43 km	8.000.000.000	19 km	8.000.000.000	19 km	8.000.000.000	95,2 Km	32.000.000.000
35	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Bengkalis A	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	14,2 km	8.000.000.000	29 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	68,2 Km	32.000.000.000
36	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Bengkalis B	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	14,2 km	8.000.000.000	29 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	68,2 Km	32.000.000.000
37	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kec.Bengkalis C	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	14,2 km	8.000.000.000	29 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	68,2 Km	32.000.000.000

78	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	11,4 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	47,8 Km	32.000.000.000
79	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	11,4 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	47,8 Km	32.000.000.000
80	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau D	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	11,4 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	47,8 Km	32.000.000.000
81	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau E	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	11,4 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	47,8 Km	32.000.000.000
82	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau F	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	11,4 km	8.000.000.000	11,4 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	12,5 km	8.000.000.000	47,8 Km	32.000.000.000
83	Replikasi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Pendampingan Masyarakat Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	2 Kec	500.000.000	2 Kec	250.000.000	1 Kec	750.000.000
Program Lingkungan Sehat Perumahan		Persentase peningkatan kualitas lingkungan sehat perumahan	-	-	-	-	68.100.000.000	-	81.160.000.000	-	67.860.000.000	-	67.600.000.000	100%	284.900.000.000
1	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Permukiman di Kawasan Kumuh	Dokumen Detail Engineering Design (DED) kawasan permukiman di kawasan kumuh	-	-	-	3 Dokumen	1.000.000.000	3 Dokumen	1.500.000.000	3 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	10 Dokumen	4.500.000.000
2	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Dokumen Detail Engineering Design (DED) Kawasan Permukiman Kecamatan Bantan dan Rupat Utara	-	-	-	2 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	4.000.000.000
3	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Dokumen Detail Engineering Design (DED) Kawasan Permukiman di kawasan Strategis Perbatasan Kecamatan Mandau, Bengkalis dan Rupat Utara	-	-	-	3 Dokumen	600.000.000	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	600.000.000
4	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kec.Bengkalis	Persentase Kawasan Kumuh di Kec.Bengkalis	-	-	-	3%	5.000.000.000	3%	10.000.000.000	3%	5.000.000.000	3%	5.000.000.000	12%	25.000.000.000
5	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kec.Bantan	Persentase Kawasan Kumuh di Kec.Bantan	-	-	-	2%	5.000.000.000	2%	3.000.000.000	2%	3.000.000.000	2%	3.000.000.000	8%	14.000.000.000
6	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kec.Mandau	Persentase Kawasan Kumuh di Kec.Mandau	-	-	-	4,14%	5.000.000.000	4,14%	20.000.000.000	4,14%	10.000.000.000	4,14%	10.000.000.000	16,56%	45.000.000.000
7	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kec.Pinggir	Persentase Kawasan Kumuh di Kec.Pinggir	-	-	-	0,47%	5.000.000.000	0,47%	10.000.000.000	0,47%	2.000.000.000	0,47%	2.000.000.000	1,88%	19.000.000.000
8	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kec. Bukit Batu	Persentase Kawasan Kumuh di Kec.Bukit Batu	-	-	-	3%	5.000.000.000	3%	10.000.000.000	3%	5.000.000.000	3%	5.000.000.000	12%	25.000.000.000
9	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kec.Siak Kecil	Persentase Kawasan Kumuh di Kec.Siak Kecil	-	-	-	3,30%	5.000.000.000	3,30%	10.000.000.000	3,30%	5.000.000.000	3,30%	5.000.000.000	13,20%	25.000.000.000
10	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kec.Rupat	Persentase Kawasan Kumuh di Kec.Rupat	-	-	-	2,74%	5.000.000.000	2,74%	5.000.000.000	2,74%	5.000.000.000	2,74%	5.000.000.000	10,96	20.000.000.000
11	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kec.Rupat Utara	Persentase Kawasan Kumuh di Kec.Rupat Utara	-	-	-	1,31%	5.000.000.000	1,31%	5.000.000.000	1,31%	5.000.000.000	1,31%	5.000.000.000	5,24%	20.000.000.000
12	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kec.Bandar Laksamana	Persentase Kawasan Kumuh di Kec.Bandar Laksamana	-	-	-	1,31%	5.000.000.000	1,31%	5.000.000.000	1,31%	5.000.000.000	1,31%	5.000.000.000	5,24%	20.000.000.000
13	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kec.Bathin Solapan	Persentase Kawasan Kumuh di Kec.Bathin Solapan	-	-	-	1,31%	5.000.000.000	1,31%	5.000.000.000	1,31%	5.000.000.000	1,31%	5.000.000.000	5,24%	20.000.000.000
14	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kec.Talang Muandau	Persentase Kawasan Kumuh di Kec.Talang Muandau	-	-	-	1,31%	5.000.000.000	1,31%	5.000.000.000	1,31%	5.000.000.000	1,31%	5.000.000.000	5,24%	20.000.000.000
15	Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Kawasan Kumuh	Tersedianya Peraturan Perundang Undangan Tentang Kawasan Kumuh	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	-	-	2 Kegiatan	300.000.000
16	Pembinaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kab. Bengkalis	Jumlah Kecamatan Terlaksananya Administrasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kab. Bengkalis	-	1 Kec	500.000.000	1 Kec	500.000.000	1 Kec	500.000.000	1 Kec	500.000.000	1 Kec	500.000.000	1 Kec	2.500.000.000
Program Pengembangan Perumahan		Persentase Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni	100%	1.383.821.840	100%	47.460.000.000	100%	64.160.000.000	100%	88.226.000.000	100%	106.836.000.000	100%	307.043.821.840	
1	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manusi (NSPM)	Jumlah Dokumen NSPM yang disusun Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	2 Dokumen	200.000.000
2	Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rumah Layak Huni yang di Bangun Dalam 1 (Satu) Tahun	-	16 Unit	1.383.821.840	600 unit	46.500.000.000	600 unit	46.500.000.000	-	-	-	-	1.216 Unit	94.383.821.840
3	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bengkalis	Jumlah Rumah Layak Huni yang di Bangun Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	100 unit	8.200.000.000	100 unit	8.200.000.000	200 Unit	16.400.000.000
4	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bantan	Jumlah Rumah Layak Huni yang di Bangun Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	100 unit	8.200.000.000	100 unit	8.200.000.000	200 Unit	16.400.000.000
5	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Siak Kecil	Jumlah Rumah Layak Huni yang di Bangun Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	100 unit	8.200.000.000	100 unit	8.200.000.000	200 Unit	16.400.000.000
6	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bukit Batu	Jumlah Rumah Layak Huni yang di Bangun Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	100 unit	8.200.000.000	100 unit	8.200.000.000	200 Unit	16.400.000.000
7	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bandar Laksamana	Jumlah Rumah Layak Huni yang di Bangun Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	100 unit	8.200.000.000	100 unit	8.200.000.000	200 Unit	16.400.000.000
8	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Mandau	Jumlah Rumah Layak Huni yang di Bangun Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	100 unit	8.200.000.000	100 unit	8.200.000.000	200 Unit	16.400.000.000
9	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bathin Solapan	Jumlah Rumah Layak Huni yang di Bangun Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	100 unit	8.200.000.000	100 unit	8.200.000.000	200 Unit	16.400.000.000
10	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Pinggir	Jumlah Rumah Layak Huni yang di Bangun Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	100 unit	8.200.000.000	100 unit	8.200.000.000	200 Unit	16.400.000.000
11	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Talang Muandau	Jumlah Rumah Layak Huni yang di Bangun Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	100 unit	8.200.000.000	100 unit	8.200.000.000	200 Unit	16.400.000.000
12	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Rupat	Jumlah Rumah Layak Huni yang di Bangun Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	100 unit	8.200.000.000	100 unit	8.200.000.000	200 Unit	16.400.000.000
13	Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Rupat Utara	Jumlah Rumah Layak Huni yang di Bangun Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	100 unit	8.200.000.000	100 unit	8.200.000.000	200 Unit	16.400.000.000
14	Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Terdata Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	500 Unit	200.000.000	600 Unit	200.000.000	700 Unit	200.000.000	1000 Unit	500.000.000	2800 Unit	1.100.000.000
15	Studi Kelayakan Rumah Khusus Pegawai	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Rumah Khusus Pegawai yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000
16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	250.000.000
17	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) rumah khusus nelayan	Dokumen Detail Engineering Design (DED) Rumah Khusus Nelayan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	750.000.000
18	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Rumah Khusus Pelajar/Mahasiswa	Dokumen Detail Engineering Design (DED) Rumah Khusus Pelajar/Mahasiswa Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	750.000.000

19	Pemberdayaan Perumahan Swadaya	Persentase peningkatan kualitas perumahan swadaya dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	-	-	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.300.000.000	100%	3.750.000.000
20	Pembangunan Rumah Khusus Pegawai	Terbanggunanya Rumah Khusus Pegawai	-	-	-	-	-	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	15.000.000.000
21	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kab. Bengkulu	Jumlah Dokumen RP3KP yang Tersedia Dalam 1 (satu) Tahun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	600.000.000	0%	-	1 Dokumen	1.100.000.000
22	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Peserta Sosialisasi yang Mengetahui dan Memahami Peraturan Perundang-undangan di bidang Perumahan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	80 Orang	400.000.000
23	Sosialisasi Rumah Sehat dan Layak Huni	Jumlah Peserta yang Memahami Terkait Rumah Sehat dan Layak Huni	-	-	-	-	-	-	-	550 orang	300.000.000	550 orang	300.000.000	1100 Orang	600.000.000
24	Pembangunan Rumah Layak Huni Pola Terpadu Kecamatan Bantan	Jumlah rumah layak huni yang di bangun dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 Unit	3.500.000.000	20 Unit	3.500.000.000
25	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Data Identifikasi Perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dalam 1 (satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000
26	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Terselenggara survey data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani dalam 1 (satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000
27	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersedianya Data lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan dalam 1 (satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000
28	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000
29	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana dalam 1 (satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	20.000.000
30	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya pelatihan tim Satuan Tugas (Satgas) dalam 1 (satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000
31	Rembu Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya daftar Penerima Layanan SPW dalam 1 (satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000
32	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah warga korban bencana penerima Layak Huni (RUH) yang direhabilitasi dalam 1 (satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000
33	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah warga korban bencana penerima Layak Huni (RUH) yang dibangun dalam 1 (satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Unit	3.900.000.000	50 Unit	3.900.000.000
34	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat serah terima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000
35	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksana Administrasi Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000
36	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Persentase Pemenuhan Sistem Pendaftaran Tanah Dalam 1 (satu) Tahun	-	-	-	1 Kegiatan	600.000.000	1 Kegiatan	600.000.000	-	-	-	2 Kegiatan	1.000.000.000	
37	Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pemerintah	Terterselenggaranya Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pemerintah Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	500.000.000	-	-	-	2 Kegiatan	1.000.000.000	
38	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terwujudnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam 1 (satu) Tahun	100%	1.184.267.848	100%	600.000.000	100%	2.800.000.000	100%	8.160.000.000	100%	2.900.000.000	100%	13.914.267.848	
39	Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah	Jumlah aset yang terdata dalam 1 (satu) tahun	-	20%	487.450.000	40%	500.000.000	60%	500.000.000	80%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.487.450.000
40	Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah Daerah, Tanah Wakaf dan Tanah Orang Miskin Se-Kabupaten Bengkulu	Jumlah Pembuatan Aset Hak Tanah Dalam 1 (Satu) Tahun	-	160 Persil	496.954.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	160 Persil	496.954.000
41	Terlaksana Administrasi Pemetaan Tanah Kas Desa	Jumlah Desa yang Terlaksana Luas Tanah Kas Desa Dalam 1 (Satu) Tahun	-	160 Persil	88.817.148	2 Kec	250.000.000	2 Kec	250.000.000	3 Kec	350.000.000	3 Kec	350.000.000	10 Kecamatan	1.288.817.148
42	Pengukuran Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Se- Kabupaten Bengkulu	Jumlah Pendataan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	8 Kec	91.036.800	11 Kec	150.000.000	11 Kec	150.000.000	11 Kec	150.000.000	11 Kec	150.000.000	11 Kecamatan	691.036.800
43	Pemetaan Tanah Kas Desa Se-Kab. Bengkulu	Tersedianya Peta Digital dan Analog Tanah Kas Desa	-	-	-	-	-	11 Kec	300.000.000	11 Kec	300.000.000	11 Kec	300.000.000	11 Kecamatan	900.000.000
44	Pemetaan Rumah Layak Huni (RUH) se-Kab. Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Rumah Layak Huni (RUH) Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	11 Kec	500.000.000	4 Kec	250.000.000	11 Kec	500.000.000	11 Kecamatan	1.250.000.000
45	Pemetaan Jalan Lingkungan Permukiman Se-Kab Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Jalan Lingkungan Permukiman Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	11 Kec	500.000.000	3 Kec	500.000.000	11 Kec	500.000.000	11 Kecamatan	1.500.000.000
46	Pemetaan Sarana Sanitasi Dasar Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Sanitasi Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	11 Kec	300.000.000	3 Kec	250.000.000	11 Kec	300.000.000	11 Kecamatan	850.000.000
47	Pemetaan Penerangan Jalan Umum (PJU) se-Kab. Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog PJU Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	11 Kec	300.000.000	3 Kec	150.000.000	11 Kec	300.000.000	11 Kecamatan	750.000.000
48	Program PTSL (Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) se Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Sertifikat Hak Atas Tanah (Blang) PTSL Kabupaten Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	11 Kec	3.000.000.000	-	-	11 Kecamatan	3.000.000.000
49	Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Tersedianya Data Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Dalam Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	11 Kec	700.000.000	-	-	11 Kecamatan	700.000.000
50	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di kabupaten Bengkulu Dalam 1 (satu) Tahun	100%	349.960.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	1.899.960.000	
51	Koordinasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah Target Penyelesaian Konflik Dalam 1 (Satu) Tahun	-	5%	349.960.000	10%	350.000.000	20%	400.000.000	50%	400.000.000	75%	400.000.000	100%	1.899.960.000
52	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam 1 (satu) Tahun	-	0%	-	100%	200.000.000	100%	477.400.000	100%	1.000.000.000	100%	300.000.000	100%	1.977.400.000
53	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan	Jumlah Aparatur Pemerintah Mengikuti Pelatihan Dasar - Dasar Pemetaan dan Aplikasi GPS Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	10 Orang	600.000.000	-	-	10 Orang	600.000.000
54	Relatihan Dasar Pemetaan Tanah Bagi Aparat Kecamatan dan Desa	Jumlah Aparatur Kecamatan dan Desa yang Mengikuti Pelatihan Dasar Pemetaan 1 (Satu) Tahun	-	-	-	36 Orang	200.000.000	40 Orang	300.000.000	40 Orang	300.000.000	40 Orang	300.000.000	156 Orang	1.100.000.000
55	Pengadaan Aplikasi Database Tanah Kabupaten Bengkulu Berbasis WEB	Tersedianya Aplikasi Data Base Pertanahan Kabupaten Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	2 Kec.	177.400.000	2 Kec.	100.000.000	-	-	11 Kecamatan	277.400.000

3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Dalam 1 (Satu) Tahun	-	17 Unit	120.000.000	17 Unit	120.000.000	24 Unit	170.000.000	28 Unit	200.000.000	28 Unit	250.000.000	114 Unit	860.000.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	24 Item; 9 Orang	355.187.400	24 Item; 13 Orang	380.000.000	25 Item; 17 Orang	580.000.000	26 Item; 18 Orang	650.000.000	35 Item; 18 Orang	750.000.000	134 Item; 75 Orang	2.715.187.400
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	-	44 Item	134.700.000	45 Item	150.000.000	46 Item	150.000.000	48 Item	160.000.000	50 Item	300.000.000	233 Item	894.700.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	-	13 Item	84.988.000	13 Item	85.000.000	13 Item	85.000.000	13 Item	100.000.000	13 Item	200.000.000	65 Item	554.988.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Dalam 1 (Satu) Tahun	-	10 Item	22.660.000	10 Item	50.000.000	11 Item	50.000.000	12 Item	40.000.000	13 Item	45.000.000	56 Item	207.660.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Terbitan/Surat Kabar/Majalah dan Buku Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	-	37 Item	50.000.000	37 Item	50.000.000	37 Item	50.000.000	37 Item	75.000.000	37 Item	80.000.000	185 Item	305.000.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum Untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	235 Porsi	30.000.000	235 Porsi	30.000.000	235 Porsi	30.000.000	235 Porsi	25.000.000	235 Porsi	50.000.000	1.175 Porsi	165.000.000
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Frekuensi Dilakukan Koordinasi dan Konsultasi Dalam 1 (Satu) Tahun	-	335 Kali	800.000.000	335 Kali	1.400.000.000	335 Kali	1.400.000.000	335 Kali	1.500.000.000	335 Kali	2.500.000.000	1.675 Kali	7.600.000.000
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	-	16 Orang	249.600.000	16 Orang	350.000.000	100%	350.000.000	16 Orang	330.000.000	16 Orang	450.000.000	80 Orang	1.729.600.000
12	Biaya Pengadaan Barang dan Jasa Tim Asistensi dan Tim PPHP	Jumlah Paket Kegiatan Hasil Pemeriksaan PPHP yang diayatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	12 Bulan	697.400.000	12 Bulan	700.000.000	12 Bulan	700.000.000	12 Bulan	475.000.000	12 Bulan	750.000.000	12 Bulan	3.322.400.000
13	Pengadaan Website	Tersedianya Website dan Sarana Informasi OPD	-	-	-	-	-	100%	50.000.000	-	-	-	-	100%	50.000.000
14	Publikasi Informasi Pembangunan	Tersedianya Belanja Publikasi Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	175.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	4 Kegiatan	625.000.000
15	Penyediaan Jasa Supir Kantor	Jumlah Tenaga Supir yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	1 Orang	20.000.000	1 Orang	20.000.000	1 Orang	20.000.000	1 Orang	20.000.000	4 Orang	80.000.000
16	Pengelolaan Website	Terkelolanya Website Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000
17	Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah	Tersedia Data Jasa Jaminan Milik Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	600 Titik	500.000.000	360 Titik	300.000.000	1200 Orang	800.000.000
18	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	8 Orang	148.800.000	8 Orang	148.800.000	16 Orang	297.600.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100%	1.967.900.000	100%	3.340.000.000	100%	3.426.000.000	100%	4.810.000.000	100%	5.660.000.000	100%	20.632.900.000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	2 Item	1.500.000.000	-	-	2 Item	1.500.000.000
2	Pengadaan Gedung Kantor UPT	Tersedianya Gedung Kantor Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	-	-	2 Item	2.000.000.000	2 Item	2.000.000.000	5 Item	4.000.000.000
3	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perengkapan Kantor Dalam 1 (Satu) Tahun	-	1 Item	130.000.000	1 Item	300.000.000	1 Item	400.000.000	1 Item	500.000.000	1 Item	600.000.000	5 Item	1.930.000.000
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	-	5 Item	148.100.000	6 Item	250.000.000	7 Item	300.000.000	8 Item	300.000.000	9 Item	500.000.000	35 Item	1.498.100.000
5	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	-	2 Item	150.000.000	1 Item	250.000.000	1 Item	250.000.000	1 Item	250.000.000	1 Item	250.000.000	6 Item	1.150.000.000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara Dalam Kantor 1 (Satu) Tahun	-	-	-	12 Bulan	240.000.000	12 Bulan	325.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	1.265.000.000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Dalam 1 (Satu) Tahun	-	3 Jenis BBM; 17 Unit Kendaraan	699.200.000	3 Jenis BBM; 17 Unit Kendaraan	700.000.000	3 Jenis BBM; 24 Unit Kendaraan	1.350.000.000	3 Jenis BBM; 24 Unit Kendaraan	500.000.000	3 Jenis BBM; 24 Unit Kendaraan	750.000.000	3 Jenis BBM; 106 Unit Kendaraan	3.999.200.000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang Terpeliharanya Dalam 1 (Satu) Tahun	-	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	260.000.000	12 Bulan	450.000.000	12 Bulan	1.310.000.000
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi Sedang/Berat Dalam 1 (Satu) Tahun	-	12 Bulan	730.600.000	6 Item	350.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	2.480.600.000
10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4 dan Roda 2 Dalam 1 (Satu) Tahun	-	0 Unit	-	7 Unit	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	7 Unit	1.000.000.000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	-	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	450.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				173 Set	86.750.000	240 Set	200.000.000	240 Set	240.000.000	240 Set	270.000.000	240 Set	300.000.000	1133 Set	1.106.750.000
1	Pengadaan Pakelan Dinas	Jumlah Pakelan Dinas dan Perengkapannya yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	-	-	-	67 Set	100.000.000	67 Set	120.000.000	67 Set	135.000.000	67 Set	150.000.000	268 Set	505.000.000
2	Pengadaan Pakelan Kerja Lapangan	Tersedianya Pakelan Kerja Lapangan dan Atribut Kelengkapannya Dalam 1 (Satu) Tahun	-	173 Set	95.750.000	173 Set	100.000.000	173 Set	120.000.000	173 Set	135.000.000	173 Set	150.000.000	865 Set	600.750.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				36 A SN	200.000.000	36 A SN	200.000.000	36 A SN	260.000.000	36 A SN	460.000.000	36 A SN	600.000.000	176 A SN	1.800.000.000
1	Bimbingan Teknis Tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintah	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk Mengikuti Bimtek/Diklat dan Pelatihan Dalam 1 (Satu) Tahun	-	35 ASN	200.000.000	35 ASN	200.000.000	35 ASN	250.000.000	35 ASN	450.000.000	35 ASN	500.000.000	175 ASN	1.800.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				8 Laporan	100.000.000	8 Laporan	100.000.000	8 Laporan	100.000.000	8 Laporan	100.000.000	8 Laporan	100.000.000	12 Laporan	200.000.000
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi/Kinerja/Keuangan yang disusun Dengan Baik	-	-	-	-	-	-	-	6 Laporan	100.000.000	6 Laporan	100.000.000	12 Laporan	200.000.000

Bengkalis, Juli 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS


GEMDRAYA ROHAINI, ST, M, SI
Pembina
NIP. 19780508 200604 1 007